

LAPORAN INDIVIDU

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/MAGANG III

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Materi Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Klaten

Laporan ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang III

Tahun Akademik 2016/2017

Dosen Pengampu Mikro : Suyato M.Pd

NIP : 19670616 199403 1 002

Guru Pendamping : Dra. Hj. Winarni

NIP : 19611111 200604 2 002



Oleh :

TEGAR DIANSA UMARQIS

13401244021/ FIS

PKnH/ 2013

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Pengesahan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA N 2 KLATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami guru pembimbing dan dosen pembimbing PPL SMA N 2 KLATEN, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Tegar Diansa Umarqis
NIM : 13401244021
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Telah melaksanakan kegiatan PPL di SMA N 2 KLATEN, dari tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Seluruh hasil kegiatan terlampir dalam laporan ini.

Yogyakarta, 15 September 2016

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Lapangan



Suyato, M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Guru Mata Pelajaran



Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Mengetahui,

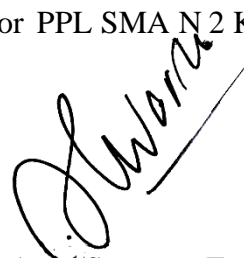
Kepala SMA N 2 KLATEN



Drs. Yohanes Priyono, M.Pd

NIP. 19570507 198903 1 007

Koordinator PPL SMA N 2 KLATEN



Drs. Agus Suwarno Endro

NIP.19611003 198703 1 013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang diselenggarakan pada semester khusus Tahun Akademik 2016/2017 berjalan dengan baik dan lancar. Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang bersifat wajib lulus di Universitas Negeri.

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PPL.
2. Kepala LPPMP beserta para staffnya yang telah memberikan arahan, informasi dan bekal dalam melaksanakan PPL.
3. Drs. Suyato, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan semangat selama kegiatan PPL.
4. Ibu Nur Hidayah, M.Si selaku DPL Pamong yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL.
5. Bapak Drs. Yohanes Priyono, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten yang telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PPL.
6. Bapak Drs. Agus Suwarno Endro selaku koordinator PPL di SMA Negeri 2 Klaten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar. Atas kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, nasihat dan pengertiannya sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan PPL dengan baik dan lancar.
7. Ibu Dra. Hj. Winarni selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas, yang telah memberikan saran, nasihat dan pencerahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
8. Bapak/Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 2 Klaten yang dengan ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah menjadikan penulis bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Klaten.
9. Bapak, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
10. Peserta didik SMA Negeri 2 Klaten, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pengalaman selama 2 bulan ini memberi banyak manfaat kepada kita.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf kepada semua pihak, apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang Insya Allah penulis tidak sengaja. Saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan agar kegiatan penulis selanjutnya menjadi lebih baik.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun. Semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Klaten, 15 September 2016

Penyusun



Tegar Diansa Umarqis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi dan Kondisi Sekolah	2
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL.....	6
C. Penyusunan Laporan PPL.....	7
BAB II	
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL.....	8
A. Persiapan PPL.....	8
B. Pelaksanaan Program PPL.....	10
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi.....	14
BAB III	
PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan.....	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Program kerja PPL
2. Laporan Mingguan
3. Kartu Bimbingan PPL di Lokasi
4. Perangkat Administrasi:
 - a. Silabus
 - b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas X
 - c. Program Semester Sekolah kelas X
 - d. Program Tahunan Sekolah kelas X
 - e. Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa
 - f. Daftar Hadir Siswa kelas X
5. Perangkat Evaluasi Pembelajaran:
 - a. Soal Ulangan
 - b. Kunci Jawaban Ulangan Harian
6. Dokumentasi Kegiatan PPL:
 - a. Foto kegiatan
 - b. Rekapitulasi Dana

Praktik Pengalaman Lapangan
Universitas Negeri Yogyakarta
Semester Khusus Tahun Ajaran 2016/2017

ABSTRAK

Oleh : Tegar Diansa Umarqis

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar di lapangan secara langsung kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan kemampuan akademis maupun praktis dalam dunia pendidikan, memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial juga dikembangkan dalam kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan mahasiswa mempunyai bekal dan pengalaman sebagai calon pendidik yang berkualitas dan profesional.

Dalam pelaksanaan PPL yang bertempat di SMA Negeri 2 Klaten, para praktikan mencoba mengajarkan materi sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. Persiapan mengajar yang dibutuhkan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan pembuatan media yang sesuai serta sangat dibutuhkan dalam memperlancar proses belajar mengajar. Dalam setiap kali praktik mengajar di lapangan wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai persiapan mengajar supaya lebih mudah dan lebih menguasai materi yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Kegiatan PPL ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli – 15 September 2016. Melalui kegiatan PPL ini banyak sekali manfaat yang dapat diambil oleh para praktikan, baik dalam hal mengajar maupun dalam hal mengasah kepribadian bermasyarakat. Praktikan dapat mengetahui bagaimana menjadi guru yang baik dan dapat memberikan bekal kepada para praktikan untuk dapat mencapai sebuah proses pembelajaran yang optimal demi terciptanya efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya dari Universitas Negeri Yogyakarta dalam mempersiapkan tenaga profesional kependidikan yang memiliki nilai serta pengetahuan dan juga keterampilan yang profesional. Dalam kegiatan PPL ini, mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk dapat mengenal, mengamati, dan mempraktikkan semua kompetensi yang diperlukan oleh seorang calon guru di lingkungan sekolah selain mengajar. Bekal yang diperoleh dalam kegiatan PPL ini diharapkan dapat dipakai sebagai modal untuk mengembangkan diri sebagai calon guru yang sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang tenaga kerja akademis selain mengajar di kelas.

Program PPL, keduanya merupakan mata kuliah intrakurikuler yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa S1 program kependidikan. Dengan diadakannya PPL secara terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. PPL akan memberikan *lifeskill* bagi mahasiswa, yaitu pengalaman belajar yang kaya, dapat memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian, tanggung jawab dan kemampuan dalam memecahkan masalah sehingga keberadaan program PPL ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai tenaga kependidikan yang mendukung profesinya.

Penyelenggaraan PPL memiliki serangkaian alur yang harus dilewati terlebih dahulu oleh mahasiswa, seperti sebelum kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan, mahasiswa terlebih dahulu menempuh kegiatan yaitu pra PPL melalui pembelajaran mikro dan kegiatan observasi di sekolah. Kegiatan pembelajaran mikro dilakukan dengan teman sesama mahasiswa pada setiap program studi masing-masing dan dibimbing oleh dosen pembimbing serta guru yang ditunjuk oleh pihak UPPL. Sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi PPL, mahasiswa diharuskan melakukan observasi. Kegiatan observasi di sekolah tempat lokasi PPL yang akan dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah beserta kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran.

A. ANALISIS SITUASI

Kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu usaha yang dilakukan guna meningkatkan efisiensi serta kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Program PPL merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga kependidikan.

Sebelum tiba di lokasi pelaksanaan kegiatan PPL, diadakan kegiatan observasi terlebih dahulu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui serta mengenal

lebih jauh tentang keadaan sekolah baik dari segi fisik yang mencakup letak geografis sekolah, fasilitas sekolah, serta bangunan sekolah maupun dari segi non fisik yaitu meliputi potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah yang terdiri dari elemen siswa, guru dan tenaga karyawan sekolah. Kegiatan observasi PPL UNY yang berlokasi di SMA Negeri 2 Klaten menghasilkan analisis situasi yang disampaikan sebagai berikut.

Analisis yang dilakukan merupakan upaya untuk menggali potensi dan kendala yang ada sebagai acuan untuk dapat merumuskan program. Dari hasil pengamatan, maka didapatkan informasi tentang SMA Negeri 2 Klaten, yang akan dijadikan sebagai dasar acuan atau konsep awal untuk melakukan PPL.

1. Letak SMA Negeri 2 Klaten

SMA Negeri 2 Klaten yang merupakan sekolah berstatus mandiri berlokasi di Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan. Letak SMA Negeri 2 Klaten cukup strategis dan kondusif untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar karena terletak 300 meter dari jalan raya Jogja-Solo.

2. Visi dan Misi SMA Negeri 2 Klaten

Visi

Menghasilkan lulusan yang beriman, luhur dalam budipekerti, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, sains dan teknologi, unggul dalam kompetensi.

Misi

1. Membentuk karakter siswa yang beriman, bertaqwa, berbudipekerti luhur sesuai dengan agama dan nilai agama.
2. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa sejalan dengan tuntutan era globalisasi.
4. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
5. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah.
6. Menciptakan sekolah sebagai pusat pendidikan tentang lingkungan hidup dan bencana di setiap daerah dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memberdayakan seluruh civitas akademika sekolah untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana sekolah.
8. Memunculkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup serta tanggap bencana melalui pendidikan di sekolah dengan memaksimalkan perilaku penghidupan di lingkungan masyarakat.

3. Kondisi Fisik Sekolah

Secara umum SMA Negeri 2 Klaten memiliki gedung sekolah permanen. Di dalam gedung itulah terdapat berbagai fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 2 Klaten dapat dikatakan baik dan layak untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar.

SMA Negeri 2 Klaten memiliki sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar, sebagai berikut:

- 1 Lab. Fisika
- 1 Lab. Kimia
- 1 Lab. Biologi
- 1 Lab. Geografi
- 1 Lab. IPA
- 2 Lab. Komputer
- 1 Ruang Perpustakaan
- 2 Ruang UKS
- 1 Koperasi
- 1 Ruang BK
- 1 Ruang Kepala Sekolah
- 1 Ruang Wakasek
- 1 Ruang Guru
- 1 Ruang TU / Tamu
- 1 Ruang OSIS
- 1 Ruang Pramuka
- 1 Ruang Pazada Zealous (Pecinta Alam)
- 1 Ruang Agama Kristen
- 1 Ruang Agama Hindu
- 1 Ruang Tari
- 1 Ruang Karawitan
- 1 Masjid
- 3 Lapangan (Lapangan Basket/Tennis, Sepak Bola, dan Bulutangkis)
- 2 Kantin
- 3 Tempat Parkir
- 3 K. Mandi/WC Guru
- 12 K. Mandi/WC Siswa
- 1 Pos Satpam
- 1 Ruang Dapur
- 1 Ruang Gudang

4. Kondisi Non Fisik Sekolah

a. Guru

SMA Negeri 2 Klaten memiliki guru yang berkualitas dalam membantu proses belajar mengajar. Jumlah guru di SMA Negeri 2 Klaten adalah 85 orang. Mayoritas guru di sekolah ini sudah berstatus PNS dan guru yang mengajar di kelas juga merangkap sebagai Pembina dalam ekstrakurikuler sesuai dengan keahliannya masing-masing serta jabatan struktural lainnya. Sejumlah guru telah mendapatkan sertifikasi. Dari hasil sertifikasi tersebut, guru menjadi lebih profesional untuk terus mengembangkan kompetensinya dalam mengajar.

b. Siswa

Jumlah siswa SMA Negeri 2 Klaten tercatat sebanyak 1.008 siswa yang terdiri dari 328 siswa kelas X (Laki-laki : 121, Perempuan : 207), 358 siswa kelas XI (Laki-laki : 130, Perempuan : 228), dan 322 siswa kelas XII (Laki-laki : 111, Perempuan : 211).

Potensi siswa di SMA Negeri 2 Klaten sangat baik, karena sekolah ini menempati peringkat lima besar se-Kabupaten Klaten dalam bidang akademik, sedangkan di bidang non-akademik menempati peringkat pertama se-Kabupaten Klaten.

c. Karyawan

SMA Negeri 2 Klaten juga memiliki karyawan yang taat terhadap tugas dan kewajibannya masing-masing. Karyawan SMA Negeri 2 Klaten terdiri atas karyawan tata usaha, laboran, penjaga sekolah, penjaga perpustakaan, tukang kebun, petugas kebersihan dan penjaga pos satpam yang semua sigap dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

d. Ekstrakurikuler

SMA Negeri 2 Klaten memiliki beberapa ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Ekstrakurikuler dikelola oleh pihak sekolah dan bekerja sama dengan OSIS.

Beberapa ekstrakurikuler yang ada, antara lain:

1. Pramuka
2. Basket
3. PMR
4. Bulutangkis
5. Renang
6. Sepak Bola
7. Qiro'ah
8. Rohani Islam (Rohis SMADA/Roda)
9. Tari
10. Karya Ilmiah Remaja (KIR)

11. Bahasa Inggris (Conversation)
12. Pecinta Alam (Pazada Zealous)
13. Baris-berbaris (Dewagana Prameya/Dega Praya)
14. Paduan Suara (Simphony of SMADA/SOS)
15. Seni Lukis
16. Karate

Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler memungkinkan siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga hobi dan potensi yang dimiliki oleh para siswa dapat tersalurkan secara optimal.

5. Kondisi Lingkungan Sekolah

SMA Negeri 2 Klaten terletak diantara 2 kota yaitu Yogyakarta dan Surakarta tepatnya di Jalan Angsana, Desa Trunuh, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. SMA Negeri 2 Klaten merupakan salah satu SMA Negeri di Kabupaten Klaten yang dikenal luas di masyarakat Klaten karena nuansa akademis dan non-akademik yang terus ditumbuhkembangkan.

Sekolah ini merupakan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana (SWALIBA). Banyak kegiatan sudah dilakukan berkenaan dengan lingkungan, seperti tersedianya tempat sampah yang dibedakan katagorinya (organik, anorganik dan kertas), pembuatan kompos, tersedianya sumur resapan, biopori, serta adanya *greenhouse*. Dalam hal mitigasi bencana, sekolah telah melaksanakan sosialisasi dan telah melaksanakan simulasi bencana. Dengan adanya program ini, diharapkan siswa dapat lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih tanggap terhadap bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Berdasarkan hasil analisis situasi dari observasi yang telah dilakukan, maka kelompok PPL SMA Negeri 2 Klaten berusaha untuk memberikan stimulus awal untuk mengoptimalkan potensi dan mengembangkan kemampuan akademik peserta didik di SMA Negeri 2 Klaten yang diwujudkan dalam program mengajar yang telah direncanakan. Mengingat kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa PPL bersifat sementara, maka diperlukan bantuan dan dukungan dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti program yang direncanakan.

B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL

Kegiatan PPL UNY dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai tanggal 18 Juli sampai tanggal 15 September 2016. Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai di sekolah tempat praktik. Penyerahan mahasiswa di sekolah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016. Sebelum mahasiswa melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), mahasiswa diwajibkan mengikuti Mata Kuliah Micro Teaching sebanyak 2 SKS atau 1 semester,

observasi proses PBM di dalam kelas, serta pembekalan PPL dari Jurusan dan Fakultas.

Selain itu, juga harus dipersiapkan rancangan bahan acuan untuk pelaksanaan PPL di sekolah.

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan diri dari IKIP untuk menghasilkan guru yang kompeten dan tidak terlepas dari kegiatan PPL sebagai sarana mahasiswa untuk berlatih mengajar. Dengan adanya kegiatan PPL ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi mahasiswa sebagai calon guru untuk mendapatkan gambaran secara mendetail kegiatan guru dan karyawan yang berhubungan dengan sekolah.

Adapun kegiatan pelaksanaan rancangan kegiatan PPL secara umum sebelum melakukan praktik mengajar di kelas sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan guru pembimbing mengenai jadwal mengajar, pembagian materi, dan persiapan mengajar yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni 2016.
2. Membantu guru dalam mengajar serta mengisi kekosongan kelas apabila guru pembimbing tidak masuk.
3. Menyusun persiapan untuk praktik terbimbing, artinya bahwa materi atau tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ditentukan oleh guru.
4. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing, artinya bahwa bimbingan dari guru masih relatif ketat yang dilaksanakan pada kelas dengan materi berbeda.
5. Menyusun persiapan untuk praktik mengajar secara mandiri, artinya materi yang diajarkan dipilih sendiri oleh mahasiswa dan diberi kesempatan untuk mengelola proses pembelajaran secara penuh, namun tetap ada bimbingan dan pemantauan dari guru.
6. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disahkan oleh guru pembimbing. RPP sebagai pedoman dan perencanaan dalam penyampaian materi yang akan diajarkan.
7. Menerapkan inovasi pembelajaran yang cocok dengan keadaan siswa dengan cara pemilihan media dan metode pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan disampaikan.
8. Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, baik yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, maupun interpersonal, yang dilakukan dengan teman sejawat, guru koordinator sekolah, dan dosen pembimbing.

Demikianlah rancangan kegiatan PPL yang pokok, sedangkan program lainnya bersifat insidental sesuai dengan keadaan yang terjadi selama pelaksanaan PPL.

C. PENYUSUNAN LAPORAN PPL

Laporan PPL merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan PPL. Laporan ini disusun oleh masing-masing mahasiswa praktikan. Isi laporan PPL meliputi seluruh kegiatan PPL yang dilaksanakan mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan tersebut sekaligus berfungsi sebagai pelengkap administrasi dari seluruh rangkaian kegiatan PPL.

BAB II

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL

Pada bab ini akan diuraikan tentang persiapan PPL, pelaksanaan program dan analisis hasil program PPL yang telah dirumuskan yaitu pada program PPL yang tertuang dalam matriks program kerja. Pelaksanaan program kerja dimulai pada minggu ketiga bulan Juli dan diakhiri pada minggu kedua bulan September 2016. Sebelum pelaksanaan program maka ada persiapan yang perlu dipersiapkan demi kelancaran program tersebut.

A. PERSIAPAN PPL

Keberhasilan suatu kegiatan sangatlah tergantung dari persiapannya. Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL, maka praktikan melakukan berbagai persiapan sebelum praktik mengajar. Persiapan-persiapan tersebut termasuk kegiatan yang diprogramkan dari lembaga UNY, maupun yang diprogramkan secara individu oleh praktikan. Persiapan-persiapan tersebut meliputi:

a. Pengajaran Mikro

Persiapan paling awal yang dilakukan oleh praktikan adalah mengikuti kuliah pengajaran mikro. Di sini praktikan sekaligus melakukan praktik mengajar. Yang berperan sebagai guru adalah praktikan sendiri dan yang berperan sebagai siswa adalah teman satu kelompok PPL area Klaten yang berjumlah 5 orang dengan 1 orang dosen pembimbing.

Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam metode dan media pembelajaran dicobakan dalam kegiatan ini, sehingga praktikan memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan demikian, pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik dari segi materi maupun penyampaian metode pembelajaran. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti PPL.

b. Pembekalan

Kegiatan pembekalan merupakan salah satu persiapan yang diselenggarakan oleh lembaga UNY, dilaksanakan dalam bentuk pembekalan PPL. Pembekalan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di ruang Ki Hajar Dewantara Fakultas Ilmu Sosial, UNY. Dalam pembekalan, diberikan beberapa materi yang berkaitan dengan PPL yang akan dilaksanakan, antara lain:

- a. Menjaga nama baik individu, kelompok dan lembaga.
- b. Selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah.
- c. Menjaga hubungan antar teman dalam kelompok.
- d. Mempersiapkan dan melaksanakan program kerja baik kelompok maupun individu dengan cermat, baik dan maksimal.
- e. Melakukan evaluasi setiap program kerja selesai.

Selain itu, dalam pembekalan PPL juga diberitahu tentang permasalahan-permasalahan yang sering timbul ketika di lapangan. Diharapkan dengan diberitahukannya permasalahan-permasalahan tersebut, mahasiswa peserta PPL dapat menghindari atau mengantisipasi jika timbul suatu permasalahan. Adapun hasil dari pembekalan ini adalah bertambahnya pemahaman mahasiswa PPL terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lapangan.

c. Observasi

Observasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi pra PPL dan observasi kelas pra mengajar.

1. Observasi pra PPL (16 Maret 2016)

Meliputi:

- a) Observasi fisik, yang menjadi sasaran adalah gedung sekolah, kelengkapan sekolah dan lingkungan yang akan menjadi tempat praktik.
- b) Observasi proses pembelajaran, praktikan melakukan pengamatan proses pembelajaran dalam kelas, meliputi metode yang digunakan, media yang digunakan, administrasi mengajar berupa Silabus, RPP, buku kerja guru dan strategi pembelajaran.
- c) Observasi siswa, meliputi perilaku siswa ketika proses pembelajaran ataupun di luar itu. Digunakan sebagai masukan untuk menyusun strategi pembelajaran.

2. Observasi kelas pra mengajar

Dilakukan pada kelas yang akan digunakan untuk praktik mengajar, tujuan kegiatan ini antara lain:

- a) Mengetahui materi yang akan diberikan,
- b) Mempelajari situasi kelas,
- c) Mempelajari kondisi siswa (aktif/tidak aktif), dan
- d) Memiliki rencana konkret untuk mengajar.

d. Pembimbingan PPL

Pembimbingan untuk PPL dilakukan oleh DPL PPL dengan cara komunikasi jarak jauh dengan melalui alat komunikasi. Kegiatan ini memiliki

tujuan untuk membantu kesulitan atau permasalahan dalam pelaksanaan program PPL.

e. Persiapan sebelum Mengajar

Sebelum mengajar mahasiswa PPL harus mempersiapkan administrasi dan persiapan materi, serta media yang akan digunakan untuk mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana dan harapan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain:

- 1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi rencana pembelajaran untuk setiap kali pertemuan.
- 2) Pembuatan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan dapat membantu pemahaman siswa dalam menemukan konsep, yang dapat berupa objek sesungguhnya ataupun model.
- 3) Diskusi dengan sesama rekan praktikan, yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah mengajar untuk saling bertukar pengalaman dan juga untuk bertukar saran dan solusi.
- 4) Diskusi dan konsultasi dengan guru pembimbing yang dilakukan sebelum dan sesudah mengajar.

B. PELAKSANAAN PROGRAM PPL

a. Persiapan

Sebelum dilaksanakan praktik mengajar, praktikan mempersiapkan perangkat pembelajaran, antara lain:

- 1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
- 2) Menggunakan Standar Kompetensi
- 3) Media Pembelajaran

Dalam membuat perangkat pembelajaran, praktikan mengacu pada buku acuan yang disesuaikan dengan guru pembimbing mata pelajaran PPKn, buku pendukung pelajaran yang sesuai dengan guru dan Kurikulum 2013.

b. Praktik Mengajar

1. Pelaksanaan Praktik Mengajar

Dalam PPL ini, praktikan diberi kesempatan mengajar 4 (empat) kelas dalam 8 minggu yaitu kelas X MIPA 1, X MIPA 3, X MIPA 4, X MIPA 7 dengan jumlah jam yaitu 8 jam per minggu.

Peta Materi PPKn SMA N 2 Klaten

Metode yang digunakan selama kegiatan praktik mengajar adalah penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, STAD, PBL serta ada latihan-latihan soal.

Setelah melakukan kegiatan praktik mengajar di kelas, guru pembimbing memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan praktik mengajar, meliputi cara penyampaian materi, penguasaan materi, ketepatan media yang digunakan, waktu, kejelasan suara dan cara menguasai kelas. Jika selama proses pembelajaran ada kekurangan-kekurangan dan kesulitan dari praktikan, guru pembimbing akan memberikan arahan dan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Masukan dari guru pembimbing sangat bermanfaat bagi praktikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Pada pelaksanaannya, praktikan melakukan praktik mengajar sebanyak 8 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Jam	Materi	Kelas
1	Selasa, 26 Juli 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Pengertian HAM Kasus-kasus Pelanggaran HAM Kasus Pelanggaran HAM Marsinah	X MIPA 1
2	Rabu, 27 Juli 2016	06.45- 08.15	Pengertian HAM Kasus-kasus Pelanggaran HAM Kasus Pelanggaran HAM Marsinah	X MIPA 4
3	Rabu, 27 Juli 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Pengertian HAM Kasus-kasus Pelanggaran HAM Kasus Pelanggaran HAM Marsinah	X MIPA 3
4	Selasa, 2 Agustus 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Upaya Perlinadungan HAM di Indonesia Upaya Pemajuan HAM di Indonesia	X MIPA 1
5	Rabu, 3 Agustus 2016	06.45- 08.15	Upaya Perlinadungan HAM di Indonesia Upaya Pemajuan HAM di Indonesia	X MIPA 4

6	Rabu, 3 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Upaya Perlinadungan HAM di Indonesia Upaya Pemajuan HAM di Indonesia	X MIPA 3
7	Selasa, 9 Agustus 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Pembagian Kekuasaan Jhon Locke & Montesquieu Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal	X MIPA 1
8	Selasa, 9 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Pembagian Kekuasaan Jhon Locke & Montesquieu Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal	X MIPA 7
9	Rabu, 10 Agustus 2016	06.45- 08.15	Pembagian Kekuasaan Jhon Locke & Montesquieu Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal	X MIPA 4
10	Rabu, 10 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Pembagian Kekuasaan Jhon Locke & Montesquieu Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal	X MIPA 3
11	Selasa, 16 Agustus 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Tugas Kementerian Republik Indonesia Klasifikasi Kementerian Republik Indonesia Lembaga Pemerintah Non Kemeterian	X MIPA 1

12	Selasa, 16 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Tugas Kementerian Republik Indonesia Klasifikasi Kementerian Republik Indonesia Lembaga Pemerintah Non Kemeterian	X MIPA 7
13	Selasa, 23 Agustus 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Sistem Nilai Dalam Pancasila Implementasi Pancasila Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	X MIPA 1
14	Selasa, 23 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Sistem Nilai Dalam Pancasila Implementasi Pancasila Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	X MIPA 7
15	Rabu, 24 Agustus 2016	06.45- 08.15	Tugas Kementerian Republik Indonesia Klasifikasi Kementerian Republik Indonesia Lembaga Pemerintah Non Kemeterian	X MIPA 4
16	Rabu, 24 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Tugas Kementerian Republik Indonesia Klasifikasi Kementerian Republik Indonesia Lembaga Pemerintah Non Kemeterian	X MIPA 3
17	Selasa, 30 Agustus 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Ulangan Harian	X MIPA 1
18	Selasa, 30 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Ulangan Harian	X MIPA 7

19	Rabu, 31 Agustus 2016	06.45- 08.15	Sistem Nilai Dalam Pancasila Implementasi Pancasila Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	X MIPA 4
20	Rabu, 31 Agustus 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Sistem Nilai Dalam Pancasila Implementasi Pancasila Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	X MIPA 3
21	Selasa, 6 September 2016	09.00- 09.45 10.00- 10.45	Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	X MIPA 1
22	Selasa, 6 September 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	X MIPA 7
23	Rabu, 7 September 2016	06.45- 08.15	Ulangan Harian	X MIPA 4
24	Rabu, 7 September 2016	11.30- 12.15 12.35- 13.20	Ulangan Harian	X MIPA 3

2. Media

Media yang digunakan dalam proses pengajaran yaitu media yang telah tersedia di sekolah yaitu laptop, LCD proyektor, *whiteboard* dan *boardmaker*.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan sekali, yaitu pada akhir pertemuan, setelah semua materi selesai. Materi pelajaran yang diujikan adalah semua materi yang telah disampaikan mahasiswa praktikan.

C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN

1. Analisis Praktik Pembelajaran

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan selama 9 minggu yaitu mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Kegiatan PPL difokuskan pada kemampuan mengajar yang meliputi : pembuatan media pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan praktik mengajar yang selanjutnya menyusun dan menerapkan alat evaluasi, analisis hasil belajar siswa, serta penggunaan media pembelajaran.

Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan kurang lebih 90% dapat terlaksana, baik metode maupun media. Praktikan tidak bisa melaksanakan semuanya sampai 100%, karena banyaknya jam mengajar yang terpotong acara-acara sekolah ataupun pengurang jam pelajaran sedangkan praktikan harus sampai pada tahap evaluasi pembelajaran. Secara rinci kegiatan PPL dapat dianalisis sebagai berikut.

2. Hambatan dan Solusi Pengajaran

- a) Adanya hari libur dan pengurangan jam pelajaran menjadi 35 menit pada hari tertentu menyebabkan materi yang disampaikan semakin tidak sesuai dengan target.

Solusi : Memanfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin untuk menerangkan materi pelajaran dan memberikan materi dalam bentuk *soft file powerpoint* kepada siswa.

- b) Kurangnya kedisiplinan dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran menyebabkan sulitnya siswa menyerap materi dan guru harus menjelaskan berulang-ulang.

Solusi : Mengkondisikan siswa di dalam kelas, mengemas pelajaran semenarik mungkin dengan menggunakan media dan metode yang sesuai dengan materi pelajaran serta memberikan *reward* kepada siswa yang mengerjakan soal di papan tulis, dan memberikan sikap yang tegas bagi siswa yang mengganggu Proses Belajar Mengajar (PBM).

- c) Untuk metode tanya jawab sulit diterapkan. Siswa sulit jika dimintai keaktifan memberi pendapat atau memberikan jawaban yang benar.

Solusi : Guru membantu dengan mengarahkan pertanyaan demi pertanyaan yang lebih mudah dan dipahami oleh siswa, guru memberikan motivasi agar siswa lebih berani mengungkapkan

pendapatnya biarpun salah, dan menunjuk langsung siswa dan meminta siswa lain membantunya jika tidak bisa, serta memberikan *applause*.

- d) Setiap siswa mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda, sehingga praktikan mengalami kesulitan ketika perbedaan.

Dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), guru pembimbing mata pelajaran PPKn memberikan bimbingan secara langsung kepada praktikan, baik sebelum pengajaran berlangsung maupun setelah pelaksanaan pengajaran. Guru pembimbing akan memberikan umpan balik yang berkaitan dengan teknis mengajar yang dilakukan praktikan di depan kelas sehingga apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi maupun yang lain dalam proses pembelajaran, guru pembimbing akan memberikan tanggapan kepada praktikan. Hal ini dimaksudkan agar praktikan dapat melakukan pengajaran yang lebih baik.

Selama praktik mengajar di SMA Negeri 2 Klaten telah banyak yang praktikan dapatkan, yaitu antara lain bahwa seorang guru dituntut untuk lebih memahami setiap siswanya dengan berbagai sifat dan perilakunya yang kadang mengganggu, dapat kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran serta pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Guru harus berperan sebagai mediator bagi siswa dalam menemukan konsepnya sendiri dan yang tidak kalah pentingnya siswa diajak untuk mengenal lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran sehingga siswa dapat belajar pula dari gejala atau fenomena alam. Selain itu, guru juga harus mampu memberikan pesan moral sesuai dengan materi dan kehidupan di sekitar siswa.

3. Umpan Balik dari Guru Pembimbing

Dalam hal ini praktikan dalam menyelesaikan programnya, mahasiswa praktikan berkonsultasi dengan guru pembimbing apakah benar atau masih kurang sesuai atau ada hal lainnya. Guru pembimbing di sini memberi umpan balik yang baik. Guru pembimbing membantu mengarahkan, membimbing, dan memberikan pengertian dalam setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa praktikan. Oleh karena itu, guru pembimbing memberikan umpan balik yang sangat baik, jadi keduanya saling mendukung.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PPL pada tahun ini yang menggunakan Kurikulum 2013 menjadi ajang yang tepat bagi mahasiswa untuk lebih mendalami sekaligus menerapkan amanat kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Praktikan sebagai mahasiswa merasa sangat beruntung karena UNY telah memberikan bekal yang lumayan cukup.
2. Dengan mengikuti kegiatan PPL, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menemukan permasalahan-permasalahan aktual seputar kegiatan belajar mengajar dan berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan menerapkan ilmu atau teori-teori yang telah dipelajari di kampus terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Pada kenyataannya, praktikan masih sering mendapat kesulitan karena minimnya pengalaman.
3. Di dalam kegiatan PPL, mahasiswa bisa mengembangkan kreativitasnya, misalnya dengan menciptakan media pembelajaran, menyusun materi sendiri berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Praktikan juga mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan semua komponen sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar.
4. PPL memperluas wawasan mahasiswa tentang tugas pendidik, kegiatan persekolahan dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

B. SARAN

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan hasil pengalaman praktikan selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), antara lain:

1. Untuk SMA Negeri 2 Klaten

- a. Perlunya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban terutama bagi siswa-siswi karena masih banyak siswa yang tidak mematuhi tata tertib sekolah.
- b. Penggunaan media penunjang belajar, LCD, OHP, gambar dan alat peraga lainnya agar lebih dimaksimalkan lagi dan tidak hanya terbatas pada pelajaran tertentu saja, sehingga siswa maupun guru bisa mencapai

kompetensi yang ditentukan dengan cara yang lebih menarik dan lebih efektif.

- c. Hendaknya pihak sekolah melakukan monitoring secara lebih intensif terhadap proses kegiatan PPL yang berada di bawah bimbingan guru yang bersangkutan.
- d. Pihak sekolah hendaknya memberikan masukan yang membangun bagi mahasiswa PPL mengenai segala permasalahan berkaitan dengan proses pengajaran.

2. Untuk Mahasiswa PPL yang akan datang

- a. Praktikan sebaiknya mempersiapkan diri sedini mungkin dengan mempelajari lebih mendalam teori-teori yang telah dipelajari dan mengikuti pengajaran mikro dengan maksimal.
- b. Praktikan harus belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, dan memanfaatkan kesempatan PPL sebaik-baiknya.
- c. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim hendaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir.
- d. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik dengan siapa saja, pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana mestinya.
- e. Mahasiswa PPL harus mempersiapkan kegiatan mengajar dengan baik meliputi persiapan materi, perangkat pembelajaran dan juga dari diri pribadi mahasiswa.
- f. Hendaknya mahasiswa sering berkomunikasi pada guru dan dosen pembimbing sebelum dan sesudah mengajar, supaya bisa diketahui kelebihan, kekurangan dan permasalahan selama mengajar. Dengan demikian proses pembelajaran akan mengalami peningkatan kualitas secara terus menerus.
- g. Hendaknya mahasiswa selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama berada di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, agar dapat terjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang bersangkutan.
- h. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengajar, serta manajemen sekolah dan manajemen pribadi secara baik dan bertanggung jawab.
- i. Praktikan harus menjaga nama baik almamater UNY, disiplin dan bertanggung jawab

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun UPPL UNY. 2014. *Panduan KKN-PPL*. Yogyakarta : UPPL, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tim Penyusun UPPL UNY. 2014. *Panduan Pengajaran Mikro*. Yogyakarta : UPPL, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyawati, Renny. 2009. *Laporan Individu KKN-PPL UNY*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

LAMPIRAN



Universitas Negeri Yogyakarta

MATRIK PROGRAM KERJA PPL

TAHUN 2016

SMA N 2 KLATEN

F01

untuk
mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis

Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah

No. Mahasiswa : 13401244021

Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn

No	Program /kegiatan PPL	Februari	Maret	Juni	JULI					Agustus					September					Jumlah jam		
		Jumlah jam/minggu	Jumlah jam/minggu	Jumlah jam /minggu	Jumlah jam/minggu					Jumlah jam/minggu					Jumlah jam/minggu					Mengajar	Non mengajar	
		IV	III	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V			
1	Penyerahan PPL																					
	a. persiapan																					
	b. pelaksanaan	1																				1
	c. evaluasi																					
2.	Observasi																					
	a. persiapan																					



Universitas Negeri Yogyakarta

MATRIK PROGRAM KERJA PPL

TAHUN 2016

SMA N 2 KLATEN

F01
untuk mahasiswa

	b. pelaksanaan	1	2		2															5
	c. evaluasi																			
3.	PPDB																			
	a. persiapan			1																1
	b. pelaksanaan			10																10
	c. evaluasi																			
Kegiatan mengajar																				
1.	Penyusunan RPP																			
	a. persiapan																			
	b. pelaksanaan							4	5	7	6	6	4	7						39
	c. evaluasi																			
2.	Pembuatan media																			
	a. persiapan																			



Universitas Negeri Yogyakarta

MATRIK PROGRAM KERJA PPL

TAHUN 2016

SMA N 2 KLATEN

F01
untuk mahasiswa

	b. pelaksanaan							1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	c. evaluasi																				
6.	Bimbingan DPL pamong																				
	a. persiapan																				
	b. pelaksanaan							1			1				1					3	
	c. evaluasi																				
7.	Ulangan Harian																				
	a. persiapan																				
	b. pelaksanaan													4	4					8	
	c. evaluasi																				
Non Mengajar																					
1.	Jaga Piket																				
	a. persiapan																				



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Sebelum Penerjunan PPL

F02
untuk mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
 Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
 Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
 No. Mahasiswa : 13401244021
 Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/Pkn
 Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Rabu, 24 Februari 2016	<p>Penyerahan dari DPL ke Sekolah.</p> <p>Observasi I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Mahasiswa PPL UNY diterima dengan baik di SMA N 2 KLATEN. • Mengamati lingkungan sekolah dan bimbingan dengan guru pembimbing mengenai kurikulum, bahan ajar, RPP dan silabus serta kelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada
2.	Rabu, 16 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi kegiatan belajar mengajar di kelas XI MIPA 1. 	<p>Pengenalan mahasiswa kepada siswa kelas XI MIPA 1 dan mengamati cara mengajar guru serta aktivitas siswa selama pelajaran PKn</p>	– Tidak ada.	– Tidak ada.



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Sebelum Penerimaan PPL

F02

untuk
mahasiswa

3.	Kamis, 30 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none">• P±PDB Penerimaan peserta didik baru	<ul style="list-style-type: none">• Membantu guru dalam kegiatan PPDB	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.
4.	Jum'at, 15 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Penerimaan PPL UNY di Gedung Olahraga UNY.	Sebanyak ± 5000 Mahasiswa UNY diterjunkan di lapangan.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 1 PPL

F02
untuk mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
 Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
 Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
 No. Mahasiswa : 13401244021
 Fak/Jur./Prodi : FIS/PknH/PKn
 Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 18 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara bendera dan halal bihalal • Bimbingan guru pamong • Konsultasi dengan pihak piket 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 mahasiswa PPL melaksanakan upacara serta pengenalan kepada sekolah dilanjutkan acara halal bihalal dengan seluruh warga sma n 2 Klaten. • Konsultasi RPP, media pembelajaran dan persiapan yang harus ada saat mengajar • Pembagian jadwal piket mahasiswa PPL UNY 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada • Belum semua terjadwal karena jadwal mengajar belum fiks 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada • Penempatan jadwal piket sementara
2.	Selasa, 19 juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Jaga piket . 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu guru piket 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlalu paham alur jaga piket 	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta bimbingan guru BK dan guru Piket



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 1 PPL

F02
untuk
mahasiswa

3.	Rabu, 20 juli 2016	• Jaga piket	• Membantu guru piket	• Tidak ada.	• Tidak ada.
4	Kamis, 21 Juli 2016	• Jaga piket	• Membantu guru piket	• Tidak ada	• Tidak ada
5.	Jum'at, 22 Juli 2016	• Kerja Bakti.dan Piket	Sebanyak ± 500 warga sekolah melakukan kerja bakti .	• Tidak ada.	• Tidak ada.

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 2 PPL

F02
untuk mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
 Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
 Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
 No. Mahasiswa : 13401244021
 Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/Pkn
 Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 25 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Jaga piket • Tugas Perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru. • Membantu merapikan buku perpustakaan dan membagikan buku mata pelajaran kepada siswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada
2.	Selasa, 26 juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di Kelas X MIPA 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Mempelajari tentang Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Canggung Karena baru pertama kali masuk kelas sebagai pengajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Memperbanyak interaksi dengan siswa agar lebih mengenal siswa
3.	Rabu, 27 juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di Kelas X MIPA 4 dan X MIPA 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Mempelajari tentang Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Canggung Karena baru pertama kali masuk kelas sebagai pengajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Memperbanyak interaksi dengan siswa agar lebih mengenal siswa



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 2 PPL

F02

untuk
mahasiswa

4	Kamis, 28 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara• Jaga Piket	<ul style="list-style-type: none">• Tercatat ada 15 siswa yang sakit dan ijin serta 3 siswa masuk terlambat	<ul style="list-style-type: none">• Tida ada	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada
5.	Jum'at, 29 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none">• Jaga piket	<ul style="list-style-type: none">• Tercatat 10 siswa ijin keluar karena keperluan bertemu dengan sponsor dan 6 siswa sakit	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 3 PPL

F02
untuk mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
 Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
 Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
 No. Mahasiswa : 13401244021
 Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn
 Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 1 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara • Jaga piket • Membuat RPP dan Media Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru • Terselesaikan sebuah RPP dengan tema Upaya Perlindungan dan Pemajuan HAM lengkap dengan media pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada
2.	Selasa, 2 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di Kelas X MIPA 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari tentang upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Sulit mengendalikan Siswa yang tidak memperhatikan pelajaran dan berbicara sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi dengan guru pembimbing dan dosen pembimbing
3.	Rabu, 3 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di Kelas X MIPA 4 dan X MIPA 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari tentang upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sulit mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan reward bagi siswa yang berani berpendapat



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 3 PPL

F02
untuk
mahasiswa

5.	Jum'at, 5 agustus 2016	• Jaga piket	• Tercatat 10 siswa ijin keluar karena keperluan bertemu dengan sponsor dan 6 siswa sakit	• Tidak ada	• Tidak ada
----	------------------------	--------------	---	-------------	-------------

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 4 PPL

F02
untuk mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
 Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
 Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
 No. Mahasiswa : 13401244021
 Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn
 Dosen Pembimbing : Suyato. M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 8 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara • Tugas Piket • Membuat RPP + Media Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru. • Telah terbuat RPP + Media Pembelajaran tentang Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada • Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada • Tidak Ada
2.	Selasa, 9 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di kelas X MIPA 1 dan X MIPA 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari tentang Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Siswa kurang bisa mengikuti pelajaran karena belum adanya buku panduan belajar dan LKS 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajar menyuruh siswa untuk mencatat dan mencari Informasi di internet



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 4 PPL

F02
untuk
mahasiswa

3.	Rabu, 10 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• KBM di kelas X MIPA 4 dan X MIPA 3	<ul style="list-style-type: none">• Mempelajari tentang Sistem Pembagian Kekuasaan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Siswa kurang bisa mengikuti pelajaran karena belum adanya buku panduan belajar dan LKS	<ul style="list-style-type: none">• Pengajar menyuruh siswa untuk mencatat dan mencari Informasi di internet
4	Jumat, 12 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Tugas Piket	<ul style="list-style-type: none">• Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada
6	Minggu, 14 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Senam dan jalan sehat• Tirakatan HUT SMA N 2 Klaten ke 51	<ul style="list-style-type: none">• Sebanyak 17 mahasiswa PPL dan Seluruh warga sekolah baik siswa guru dan aryaawan mengikuti acara jalan sehat dan senam sebagai rangkaian hari ulang tahun sma n 2 klaten yang ke 51• Sebanyak 8 mahasiswa PPL mengikuti acara tersebut dengan rangaian acara pengajian, serta dilanjutkan dengan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada• Tidak semua mahasiswa PPL dapat menghadiri acara tersebut	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 4 PPL

F02

untuk
mahasiswa

			ramah tamah dan cerita sejarah sma n 2 klaten		
--	--	--	--	--	--

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 5 PPL

F02

untuk
mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
No. Mahasiswa : 13401244021
Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn
Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 15 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Puncak HUT Sma N 2 Klaten ke 51 • Membuat RPP + Media Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa PPL semua hadir dengan mengikuti serangkaian acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan-sambutan setelah itu hiburan-hiburan selain itu ami juga membantu acara tersebut • Terbuat RPP + Media Pembelajaran tentang Fungsi dan Kedudukan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada • Tidak ada



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 5 PPL

F02

untuk
mahasiswa

2.	Selasa, 16 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• KBM di kelas X MIPA 1 dan X MIPA 7	<ul style="list-style-type: none">• Mempelajari tentang Tugas dan kedudukan Menteri, Klasifikasi Kementerian di Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Kemeterian	<ul style="list-style-type: none">• Siswa kesulitan menghafal nama-nama menteri karena karena begitu banyak menteri di Indonesia dan terlalu seringnya resufle menteri di kabinet kerja	<ul style="list-style-type: none">• Pengajar memberikan tugas mencari nama-nama menteri beserta tugasnya di Internet
3.	Rabu, 17 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara HUT RI ke 71	<ul style="list-style-type: none">• Seluruh mahasiswa PPL dan semua warga sekolah melaksanakan upacara bendera	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada.
4	Kamis, 18 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none">• Piket• Karnaval klaten	<ul style="list-style-type: none">• Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru.• Mendampingi sma n 2 klaten yang mengikuti karnaval, mahasiswa PPL membantu kegiatan karnaval dan ikut berjalan dari rute nias sampai ke panggung depan rumah dinas bupati	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada• Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada• Tidak ada



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 5 PPL

F02

untuk
mahasiswa

5.	Jum'at, 19 agustus 2016	• Tugas Piket	• Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru.	• Tidak Ada	• Tidak Ada
----	----------------------------	---------------	---	-------------	-------------

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 6 PPL

F02
untuk mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
 Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
 Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
 No. Mahasiswa : 13401244021
 Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn
 Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 22 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara Bendera • Tugas Piket • Membuat RPP + Media Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru. • Telah terbuat RPP + Media Pembelajaran tentang Sistem Nilai Dalam Pancasila, Implementasi Pancasila, dan Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada • Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada • Tidak Ada
2.	Selasa, 23 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di kelas X MIPA 1 dan X MIPA 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari Sistem Nilai Dalam Pancasila, Implementasi Pancasila, dan Nilai-nilai Pancasila dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 6 PPL

F02

untuk
mahasiswa

			Penyelenggaraan Pemerintahan Negara		
3.	Rabu, 24 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> KBM di kelas X MIPA 4 dan X MIPA 3 	<ul style="list-style-type: none"> Mempelajari tentang Tugas dan kedudukan Menteri, Klasifikasi Kementerian di Indonesia, Lembaga Pemerintah Non Kemeterian 	<ul style="list-style-type: none"> Siswa kesulitan menghafal nama-nama menteri karena karena begitu banyak menteri di Indonesia dan terlalu seringnya resufle menteri di kabinet kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Pengajar memberikan tugas mencari nama-nama menteri beserta tugasnya di Internet
5.	Jum'at, 26 agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> Tugas Piket 	<ul style="list-style-type: none"> Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Ada

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 7 PPL

F02

untuk
mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
No. Mahasiswa : 13401244021
Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn
Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 29 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Upacara Bendera • Tugas Piket 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada
2.	Selasa, 30 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di kelas X MIPA 1 dan X MIPA 7 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Harian Bab 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada
3.	Rabu, 31 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di kelas X MIPA 4 dan X MIPA 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari Sistem Nilai Dalam Pancasila, Implementasi Pancasila, dan Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 7 PPL

F02

untuk
mahasiswa

4	Kamis, 01 september 2016	<ul style="list-style-type: none">Mengorekasi Ulangan Harian	<ul style="list-style-type: none">Berhasil mengoreksi hasil ulangan harian dari kelas x mipa 7	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada
5.	Jum'at, 2 september 2016	<ul style="list-style-type: none">Tugas Piket	<ul style="list-style-type: none">Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru.	<ul style="list-style-type: none">Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none">Tidak Ada

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 8 PPL

F02

untuk
mahasiswa

Nama Sekolah : SMA N 2 Klaten
Alamat Sekolah : Jl. Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah
Guru Pembimbing : Dra. Hj. Winarni

Nama Mahasiswa : Tegar Diansa Umarqis
No. Mahasiswa : 13401244021
Fak/Jur./Prodi : FIS/PKnH/PKn
Dosen Pembimbing : Suyato M.Pd

No.	Hari/Tanggal Waktu	Materi Kegiatan	Hasil	Hambatan	Solusi
1.	Senin, 5 september 2016	<ul style="list-style-type: none">• Upacara Bendera• Tugas Piket	<ul style="list-style-type: none">• Rekap absensi dan izin siswa serta izin dan tugas dari guru.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada• Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada• Tidak Ada
2.	Selasa, 6 september 2016	<ul style="list-style-type: none">• KBM di kelas X MIPA 1 dan X MIPA 7	<ul style="list-style-type: none">• Mempelajari tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Siswa kurang bersemangat dalam mengikuti KBM karena pertemuan terakhir dengan mahasiswa PPL dan siswa menginginkan berfoto	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan Pekerjaan Rumah (PR) untuk siswa supaya meresume materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian mengirimkan lewat email



LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
Minggu Ke 8 PPL

F02
untuk mahasiswa

				bersama dengan mahasiswa PPL sebagai kenang-kenangan	
3.	Rabu, 7 september 2016	<ul style="list-style-type: none"> • KBM di kelas X MIPA 4 dan X MIPA 3 • Pembentukan Panitia PPL 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan Harian Bab 1 • Berhasil dibentuk kepanitiaan guna acara penarikan PPL pada hari sabtu mendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Ada • Tidak Ada
4	Kamis, 8 september 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan keperluan penarikan PPL 	<ul style="list-style-type: none"> • Berhasil membeli kenang-kenangan sekolah, plakat, cap stempel dan sebagainya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
5.	Jum'at, 9 september 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Apel hari olahraga nasional • Senam dan jalan sehat • Futsal bersama siswa sma 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak kurang lebih 300 warga sekolah mengikuti apel hari olahraga nasional • Sebanyak kurang lebih 300 warga sekolah senam dan jalan sehat • Bermain futsal sebagai rangkaian acara hari olahraga nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada. • Tidak ada • Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada. • Tidak ada • Tidak ada



Universitas Negeri Yogyakarta

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL Minggu Ke 8 PPL

F02

untuk
mahasiswa

		<ul style="list-style-type: none"> Gladi bersih penarikan mahasiswa PPL tahun 2016 UNY 	<ul style="list-style-type: none"> Setting tempat penarikan, penataan dan menghias tempat, latihan masing-masing sie, cek sarana dan prasaran, kenangan, dan berbagai keperluan yang dibutuhkan 		
6	Sabtu, 10 september 2016	<ul style="list-style-type: none"> Penarikan mahasiswa PPL tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> Acara berhasil 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">

Dosen Pembimbing Lapangan

Suyato M.Pd

NIP. 19670616 199403 1 002

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni

NIP. 19611111 200604 2 002

Klaten, 12 September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis

NIM. 12401244021

SILABUS

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Kelas : X (Sepuluh)

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>2.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara</p> <p>3.1 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>4.1. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p>	<p>Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara</p> <p>a. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara</p> <p>b. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p> <p>c. Nilai-nilai Pancasila dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik) nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam/dialektis dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan Membuat laporan hasil pengamatan Mempersentasikan hasil laporan di depan kelas (format persentasi terlampir). <p>2. Observasi: Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam</p>	6 x 45 menit	<p>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa.</p> <p>LKS Pendidikan Kewarganegaraan kelas X</p> <p>UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>Sumber lain yang relevan.</p> <p>Internet (Blog harus bisa dipercaya)</p>

	Penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (Buku yang relevan, media masa, memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi)dengan penuh kejujuran dan toleransi tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. Menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangtentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 	kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah. 3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah. 4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah		
1.2 Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur	Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau melakukan kajian 	1. Tugas: - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik	8 x 45 menit	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

<p>tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil</p> <p>2.2 Mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>1.3 Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan</p>	<p>mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>a. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia</p> <p>c. Kemerdekaan beragama dan berkepercaayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia</p> <p>d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia</p>	<p>konstitusionalitas (membaca ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 	<p>Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan - Membuat laporan hasil pengamatan - Mempersentasikan hasil laporan di depan kelas (format persentasi terlampir). <p>2. Observasi: Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan</p>	<p>SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa.</p> <p>LKS Pendidikan Kewarganegaraan kelas X</p> <p>UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>Sumber lain yang relevan.</p> <p>Internet (Blog harus bisa dipercaya)</p>
--	--	--	---	--

<p>Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. • Menganalisis dan menyimpulkan serta mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, 	<p>kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah</p>		
---	--	---	---	--	--

		pertahanan dan keamanan	negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.		
<p>1.3 Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil</p> <p>2.3 Mendukung perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>1.4 Mensintesis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang</p>	<p>Kewenangan lembaga-lembaga Negara.</p> <p>a. Suprastruktur dan Infrastruktur sistem politik Indonesia</p> <p>b. Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Kewenangan lembaga-lembaga Negara. Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan Membuat laporan hasil pengamatan Mempersentasikan hasil laporan di depan kelas (format persentasi terlampir). <p>2. Observasi:</p> <p>Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan Kewenangan lembaga-lembaga Negara.</p>	8 x 45 menit	<p>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa.</p> <p>LKS Pendidikan Kewarganegaraan kelas X</p> <p>UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>Sumber lain yang relevan.</p>

<p>kewenangan lembaga- lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>c. Partisipasi warga negara dalam sistem politik RI</p>	<p>dengan penuh disiplin dan tanggung jawab tentang kewenangan lembaga- lembaga Negaramenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang kewenangan lembaga- lembaga Negaramenurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 	<p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Kewenangan lembaga- lembaga Negara.</p> <p>4. Tes Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Kewenangan lembaga- lembaga Negara.</p>		<p>Internet (Blog harus bisa dipercaya)</p>
<p>1.4.Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil</p>	<p>Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah a. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mengamati gambar /tayangan video/film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber (buku, artikel, media cetak maupun elektronik) tentang hubungan struktural dan fungsional 	<p>1. Tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah Diskusi kelompok membahas hasil pengamatan 	<p>8 x 45 menit.</p>	<p>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1.</p>

<p>2.4 Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>1.5 Mengkreasikan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4 Menyaji hasil penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat</p> <p>c. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah</p> <p>d. Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah</p>	<p>pemerintahan pusat dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara pro-aktif dan responsif dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i> (HOTS) tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk media cetak dan elektronik secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat laporan hasil pengamatan Mempersentasikan hasil laporan di depan kelas (format persentasi terlampir). <p>2. Observasi: Menilai kegiatan pengamatan dan tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <p>3. Portofolio, Penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah</p> <p>4. Tes</p>	<p>Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa.</p> <ol style="list-style-type: none"> LKS Pendidikan Kewarganegaraan kelas X UUD NRI Tahun 1945. Sumber lain yang relevan. Internet (Blog harus bisa dipercaya)
--	--	---	---	---

		analisis data dan hasil proyek Kewarganegaraan secara pro aktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah	Digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang Hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah.		
--	--	--	---	--	--

Program Tahunan (PROTA)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kelas/Semester : XI IPA/IPS

Tahun Pelajaran : 2016/2017

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Semester Gasal

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Alokasi Waktu (JP)
2.	2.1. Mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.1.1. Membangun nilai-nilai toleran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 2.1.2. Membangun nilai-nilai kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	8
	2.5 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara	2.5.1 Membangun nilai-nilai toleransi dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. 2.5.2 Membangun nilai-nilai kejujuran dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara.	
	3.2 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	3.2.1 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 3.2.2 Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen. 3.2.3 Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. 3.2.4 Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan.	

	4.1 Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara	4.1.1 Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 4.1.2 Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.	
3.	3.1. Menghayati nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil	3.1.1. Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan 3.1.2. Membangun nilai-nilai kerja sama secara adil ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	6

<p>2.6 Mendukung nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	<p>2.6.1 Membangun nilai-nilai menghargai yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p> <p>2.6.2 Membangun nilai-nilai kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	
<p>3.3 Mengkatagorikan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan</p>	<p>3.3.1 Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia</p> <p>3.3.2 Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</p> <p>3.3.3 Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia</p> <p>3.3.4 Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia</p>	
<p>4.2 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>	<p>4.2.1 Menyaji hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan</p>	

		4.2.2 Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan	
4.	4.1. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil	4.1.1. Membangun nilai-nilai disiplin atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.1.2. Membangun nilai-nilai tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	8
	2.7 Mendukung perilaku peduli terhadap nilai-nilai terkait fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.7.1 Membangun nilai-nilai disiplin tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.7.2 Membangun nilai-nilai tanggung jawab tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
	3.3 Mensintesis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.3.1 Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia	

		<p>3.3.2 Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara RI menurut UUD NRI Tahun 1945</p> <p>3.3.3 Menganalisis <i>impeachment</i> dalam Ketatanegaraan RI</p> <p>3.3.4 Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik</p> <p>3.3.5 Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI</p>	
	<p>4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>4.3.1 Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3.2 Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	
5.	<p>1.5. Menghayati nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara adil</p>	<p>1.5.1. Membangun nilai-nilai proaktif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	6

		1.5.2. Membangun nilai-nilai responsif secara adil tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
	2.8 Menghargai nilai-nilai tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2.8.1 Membangun nilai-nilai proaktif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.8.2 Membangun nilai-nilai responsif yang terkandung dalam hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
	3.4 Mengkreasikan hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194	3.4.1 Menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.4.2 Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat.	

		3.4.3 Mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah	
		3.4.4 Menunjukkan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah	
	4.4 Menyaji hasil penalaran tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4.1 Menyaji hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
		4.4.2 Mengkomunikasikan hasil telaah hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	

C. Semester Genap

No.	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Alokasi Waktu (JP)
6.	1.5 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	1.5.1 Membangun nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 1.5.2 Membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika	10
	2.5 Mendukung nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.5.1 Membangun nilai-nilai toleran yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 2.5.2 Membangun nilai-nilai damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika	
	3.5 Menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.5.1 Mengidentifikasi kebhinnekaan bangsa Indonesia 3.5.2 Menganalisis konsep integrasi nasional 3.5.3 Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional	

		<p>3.5.4 Menganalisis membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara</p> <p>3.5.5 Menunjukkan kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara</p>	
	4.5 Mendesemontarsikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<p>4.5.1 Menyaji hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>4.5.2 Mengkomunikasikan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	
7.	1.6 Mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	<p>1.6.1 Membangun nilai-nilai kerja sama yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoeksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p> <p>1.6.2 Membangun nilai-nilai gotong royong yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoeksosbudhankam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika</p>	8

	2.6 Meyakini nilai-nilai ketahanan terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.	2.6.1 Membangun nilai-nilai kerja sama terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika 2.6.2 Membangun nilai-nilai gotong royong terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipoleksosbudhankam dalam bingkai BhinnekaTunggal Ika	
	3.6 Memprediksi indikator ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.6.1 Menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional 3.6.2 Mengidentifikasi ancaman di Bidang IPLEKSOSBUDHANKAM 3.6.3 Menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional	
	4.6 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.6.1 Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM	

		4.6.2 Mengkomunikasikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM	
8.	1.7 Menghayati nilai-nilai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia secara adil	1.7.1 Membangun nilai-nilai menghargai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 1.7.2 Membangun nilai-nilai peduli pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	10
	2.7 Mengembangkan nilai-nilai tentang pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.7.1 Membangun nilai-nilai menghargai pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.7.2 Membangun nilai-nilai peduli pentingnya wawasan nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	3.7 Mengkarakteristikkan arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.	3.7.1 Menganalisis wawasan nusantara 3.7.2 Mengidentifikasi fungsi dan tujuan wawasan nusantara	

		<p>3.7.3 Mengidentifikasi aspek trigatra dan pancagatra dalam wawasan Nusantara</p> <p>3.7.4 Menunjukkan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan</p>	
	<p>4.7 Mewujudkan keputusan bersama terkait arti pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>4.7.1 Menyaji hasil analisis tentang pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>4.7.2 Mengkomunikasikan hasil analisis pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	

**PERHITUNGAN MINGGU/JUMLAH JAM EFEKTIF
KELAS X MIPA**

A. Semester Gasal

No.	Bulan	Minggu Efektif	Hari Efektif	Jam Pelajaran Efektif
1.	Juli	1	2	2
2.	Agustus	5	2	10
3.	September	3	2	6
4.	Oktober	5	2	10
5.	November	4	2	8
6.	Desember	1	2	2
Jumlah				38

No.	Penggunaan Waktu	Alokasi Waktu (JP)
1.	Tatap Muka	28
2.	Ulangan Harian (Per BAB)	4
3.	Ulangan MID Semester	2
4.	Ulangan Akhir Semester	2
5.	Masa Pengenalan lingkungan sekolah	-
6.	Ujian Nasional	-
7.	Cadangan	2
Jumlah		38

B. Semester Genap

No.	Bulan	Minggu Efektif	Hari Efektif	Jam Pelajaran Efektif
1.	Januari	5	2	10
2.	Februari	4	2	8
3.	Maret	4	2	8
4.	April	3	2	6
5.	Mei	4	2	8
6.	Juni	2	2	4
Jumlah				44

No.	Penggunaan Waktu	Alokasi Waktu (JP)
1.	Tatap Muka	28
2.	Ulangan Harian	6
3.	Ulangan MID Semester	2
4.	Ulangan Akhir Semester	2
5.	Perbaikan	4
6.	Masa Pengenalan lingkungan sekolah	-
7.	Ujian Nasional	-
8.	Cadangan	2
Jumlah		44

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : X

Tahun Pelajaran/ Semester : 2016/2017 /Gasal

Pokok Bahasan	Alokasi Waktu (JP)	Bulan																															
		Juli					Agustus					September					Oktober						November					Desember					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
BAB I																																	
3.1.1 Menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.	2				2																												
3.1.2 Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen.	2					2																											

PROGRAM SEMESTER

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas : X

Tahun Pelajaran/ Semester : 2016/2017 /Genap

Pokok Bahasan	Alokasi Waktu (JP)	Bulan																													
		Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
BAB V																															
3.5.1 Mengidentifikasi kebhinnekaan bangsa Indonesia	2	2																													
3.5.2 Menganalisis konsep integrasi nasional	2		2																												
3.5.3 Mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional	2			2																											
3.5.4 Menganalisis membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara	2				2																										

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA N 2 Klaten
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok	: Kasus-Kasus Pelanggaran HAM
Kelas/ Program/ Semester	: X/ UMUM/ GANJIL
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

A. KOMPETENSI INTI

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

B. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. Memahami pengertian HAM
2. Menyebutkan kasus kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia
3. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami pengertian HAM
2. Menyebutkan kasus kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia
3. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM

E. MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat

dilaksanakan sebeb-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain.

Menurut John Lock pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dan tanggung jawab asasi manusia (TAM). Ketiganya merupakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia (baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global) tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia.

2. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia

- a. Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
- b. Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi Militer (DOM), di Aceh. Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dan dengan pola yang sama.
- c. Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang semakin meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap “para penjahat” secara misterius yang terkenal dengan istilah “petrus” (penembakan misterius).
- d. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Sie, Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.
- e. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang korban meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani Kusuma, Sigit Prsetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate, Fadli, Denny Yulian dan Zainal.

3. Kasus Marsinah

Cerita tragis yang dialami Sinah dimulai pada Ahad, 9 Mei 1993. Sosok perempuan muda berambut lebat itu ditemukan tak bernyawa lagi di sebuah lokasi dekat tempat tinggalnya, di Desa Wilangan, Nganjuk. Kala itu, kondisi tubuh Sinah amat mengenaskan. Sekujur tubuh penuh luka parah plus tulang panggul yang patah. Desas-desus langsung mengentak sesama rekan kerja. Beredar kabar kemudian, Sinah tewas dibunuh gara-gara terkait demonstrasi buruh yang terjadi di PT CPS. Usut punya usut, unjuk rasa para buruh dipicu sebuah surat edaran gubernur setempat. Isinya, semua perusahaan di wilayah itu diimbau menaikkan upah minimum regional (UMR). Walau kebijakan itu sudah dikeluarkan, PT CPS memilih bergeming. Perusahaan itu belum juga menaikkan UMR. Kondisi ini memicu geram para buruh. Tepat pada Senin, 3 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS berunjuk rasa dengan cara mogok kerja. Aksi ini berlanjut hingga keesokan harinya. Namun menjelang Selasa siang, manajemen perusahaan dan pekerja berdialog dan menyepakati sebuah perjanjian. Intinya, perusahaan akan mengabulkan permintaan karyawan dengan membayar upah sesuai UMR. Sepintas lalu, persoalan antara perusahaan dan karyawan seolah terselesaikan. Tapi pada keesokan harinya, sebanyak 13 orang karyawan dipanggil ke Markas Komando Distrik setempat dan diminta untuk mengundurkan diri dari PT CPS. Marsinah penuh amarah. Menurut dia, dalam kesepakatan antara karyawan dan perusahaan--yang disaksikan Kantor Departemen Tenaga Kerja Sidoarjo dan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-- PT CPS berjanji tak akan mencari-cari kesalahan karyawan pasca tuntutan kenaikan UMR. Bagi Sinah, itu artinya sama dengan tak bakal memberlakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Pada Rabu itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB, Sinah mengunjungi teman-temannya yang terkena PHK. Usai beranjangsana seraya menyampaikan keprihatinannya, perempuan lajang ini berpisah di dekat Tugu Kuning, di Sidoarjo. Sebagai kalimat perpisahan saat itu, Sinah kembali menegaskan tak bisa menerima keputusan PHK bagi rekan-rekannya tadi. Tak hanya itu, Sinah berjanji bakal menyelesaikan persoalan tersebut ke pengadilan. Terhitung sejak Rabu malam itulah, keberadaan Marsinah seolah lenyap ditelan gelap malam. Tepat delapan hari kemudian, 9 Mei 1993, tersiar kabar kalau Sinah ditemukan tewas secara tak wajar. Kasus ini sontak disorot media massa nasional. Sempat disebut-sebut, kematian sosok yang kini menjadi nama sebuah jalan di Nganjuk itu melibatkan tentara. Polisi tentu tak tinggal diam. Berdasarkan hasil penyidikan, tercatat sembilan nama yang berasal dari susunan kepemimpinan dan pemilik PT CPS sebagai tersangka pelaku penganiayaan Marsinah. Dalam persidangan

di tingkat pengadilan negeri dan tingkat banding, kesembilan orang tadi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Tapi ketika persidangan naik ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, semua tersangka malah dibebaskan demi hukum. Dasarnya: ada kesalahan prosedur dalam kasus ini.

Semenjak itulah, pengusutan Kasus Marsinah belum menunjukkan titik terang, bahkan seakan terlupakan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kasus Sinah sempat dibicarakan kembali. Bahkan Gus Dur--panggilan akrabnya--saat itu meminta agar Kasus Marsinah kembali diusut. Keinginan senada pun dikemukakan Komisi Nasional HAM saat bertemu Presiden Megawati Sukarnoputri, sekitar pertengahan April 2002. Menurut Komnas HAM, Megawati sepakat buat mengusut ulang kasus kematian peraih penghargaan HAM Yap Thiam Hien 1993 itu.

F. METODE PEMBELAJARAN

1. Pendekatan Pembelajaran : Scientific
2. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab
3. Model : discovery Learning

G. Alat dan sumber pembelajaran

1. Media :
 - a) LCD
 - b) Powerpoint
2. Sumber :
 - a) Lingkungan sekitar
 - b) LKS dan buku PKn kelas X
 - c) Lembar tugas kelompok
 - d) Buku Hukum Hak Asasi Manusia karangan Prof. Philip Alston.

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 1

Langkah	Kegiatan Guru-Siswa	Waktu
<i>Kegiatan Awal</i> (pembukaan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. ▪ Guru menyampaikan topik tentang “Kasuskasus Pelanggaran Hak Asasi 	15 menit

Manusia”. Namun sebelum mengkaji lebih lanjut tentang topik itu, terkait dengan sikap sosial, secara khusus guru mengadakan sesi perkenalan. Diusahakan masing-masing peserta didik dapat tampil untuk memperkenalkan diri (minimal sebut nama, alasan memilih SMA/SMK/MA, atau alamat, cita-cita, dan sebagainya), terakhir guru memperkenalkan diri.

- Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur bahwa peserta didik masih dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah atas (SMA)
- Guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.

Kegiatan Inti

- Sebelum peserta didik memahami 65 menit berbagai kasus pelanggaran HAM, guru menunjukkan ilustrasi/ paparan secara singkat tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- Mengamati
Peserta didik disajikan cerita tentang kasus pelanggaran HAM “Marsinah”. Seorang buruh yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) pada perusahaan tempat dia bekerja. Peserta didik diberi waktu untuk membaca kasus tersebut.
- Menanya
Peserta didik membuat pertanyaan tentang kasus Marsinah (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku).
- Mengumpulkan Informasi

	<p>Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM atau kasus sejenis dengan kasus Marsinah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengasosiasikan Peserta didik membuat analisis terkait dengan faktor penyebab dan solusi yang dapat diberikan dari kasus Marsinah yang ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM. ▪ Mengkomunikasikan Secara random peserta didik (2 sampai dengan 3 orang mewakili kelompok) dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis kasus tersebut. Adapun peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis. 	
<p><i>Kegiatan Akhir (penutup)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi tersebut ▪ Peserta didik mendokumentasikan kesimpulan yang telah dibuat oleh guru ▪ Guru mengkaitkan nilai-nilai yang ada dengan kehidupan sehari-hari ▪ Guru menutup proses pembelajaran dengan berdoa dan salam 	<p>10 menit</p>

I. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Jenis tagihan : Unjuk kerja

Bentuk tagihan : Diskusi

Bahan diskusi : Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pada Marsinah

Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok

Hari/Tanggal :

Topik diskusi/debat :

Nama Siswa :

Aspek yang dinilai	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif		Deskripsi (Alasan)
Kemampuan mengidentifikasi masalah				
Kemampuan merumuskan masalah				
Kemampuan menganalisis masalah				
Kemampuan memecahkan masalah				
Kerjasama dalam kelompok				
Partisipasi dalam diskusi				
Kemampuan mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain				
Nilai rata-rata				
Komentar				

Rubrik Penilaian Karangan

Aspek yang dinilai	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif		Deskripsi (Alasan)
Pengantar menunjuk isi				
Pengantar disajikan dengan bahasa yang baik				
Isi menunjukkan penjelasan dari kutipan/pendapat tokoh				
Isi disajikan dengan bahasa yang baik				

Penutup memberi kesimpulan akhir terhadap kutipan/pendapat tokoh				
Penutup disajikan dengan bahasa yang baik				
Nilai rata-rata				
Komentar				

Kriteria Penilaian :

Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif	
Memuaskan	4	>80
Baik	3	68-79
Cukup	2	56-67
kurang	1	<55

Klaten, 25 Juli 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

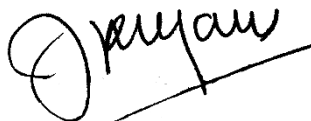
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA N 2 Klaten
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok	: Perlindungan dan Pemajuan HAM
Kelas/ Program/ Semester	: X/ UMUM/ GANJIL
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

J. KOMPETENSI INTI

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

K. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

L. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

1. menjelaskan hakikat hak asasi manusia dan periode pemajuan hak asasi manusia di Indonesia
2. menjelaskan pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta Instrumen nasional HAM
3. menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia
4. Menerapkan perilaku toleran, santun, responsif dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung

M. MATERI PEMBELAJARAN

1. Hakikat HAM

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak

dapat dilaksanakan sebeb-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain.

Menurut John Lock pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dan tanggung jawab asasi manusia (TAM). Ketiganya merupakan keterpaduan yang berlangsung secara seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia (baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global) tidak berjalan seimbang maka dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan manusia.

b. Upaya Perlindungan HAM

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Seakan tidak ingin tertinggal dengan negara-negara lain, Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia. Berikut ini akan di jelaskan beberapa institusi yang menegakkan hak asasi manusia yaitu :

- a) Mahkamah Konstitusi
- b) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- c) Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- d) Komisi Nasional Perempuan
- e) Ombudsman Republik Indonesia
- f) Pengadilan HAM
- g) POLRI
- h) Lembaga Bantuan Hukum
- i) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- j) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

c. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia

Upaya pemajuan HAM dapat di lihat dari beberapa periode pemerintahan di Indonesia, yaitu antara lain:

Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk

menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka menyatakan:

“...sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbanyak.”

Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Seperti pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- a. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
 - b. Pemerintah berharap partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Hal yang sangat penting dalam kaitan dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka.
- a) Periode 1950-1959

Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan. Sama halnya yang ditulis oleh Bagir Manan dalam buku *“Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia”* . Yaitu : Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM

mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

Periode 1959-1966

Dalam sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasangan hak asasi manusia. Yaitu dengan kata lain, telah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik warga negara.

Periode 1966-1988

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya, pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi HAM. Hak uji materiil tidak lain diadakan dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang mengembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.

Periode 1998 sampai sekarang.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (prescriptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour). Pada tahap status penentuan (prescriptive status) telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen

konstitusi negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ketetapan MPR (TAP MPR), Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Adapun, tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour) mulai dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Tahap ini ditandai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya (diratifikasi) sejumlah konvensi HAM, yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya dengan UU Nomor 5/1999; Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan keppres Nomor 83/1998; Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU Nomor 19/1999; Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan UU Nomor 21/1999; Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU Nomor 20/1999. Selain itu, juga dicanangkan program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15 Agustus 1998 yang didasarkan pada empat hal sebagai berikut :

1. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.
2. Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.
3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.
4. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional

N. METODE PEMBELAJARAN

4. Pendekatan Pembelajaran : Scientific
5. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab
6. Model : discovery Learning

O. Alat dan sumber pembelajaran

3. Media :
 - c) LCD
 - d) Powerpoint
4. Sumber :
 - e) Lingkungan sekitar
 - f) LKS dan buku PKn kelas X
 - g) Lembar tugas kelompok
 - h) Buku Hukum Hak Asasi Manusia karangan Prof. Philip Alston.

P. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 2

Langkah	Kegiatan Guru-Siswa	Waktu
<i>Kegiatan Awal</i> (pembukaan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi ▪ 2. Guru menyampaikan topik tentang “Perlindungan dan Pemajuan HAM”. 	10 menit
<i>Kegiatan Inti</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengamati Peserta didik disajikan powerpoint tentang upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. ▪ Menanya Peserta didik membuat pertanyaan tentang upaya perlindungan dan pemajuan HAM (diharapkan peserta didik dapat membuat 5 pertanyaan yang berbeda dengan teman sebangku). ▪ Mengumpulkan Informasi Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. ▪ Mengasosiasikan Peserta didik membuat analisis terkait dengan faktor penyebab dan solusi yang dapat diberikan dari kasus pelanggaran HAM yang ditinjau dari upaya perlindungan dan penegakan HAM. ▪ Mengkomunikasikan Secara random peserta didik (2 sampai dengan 3 orang mewakili kelompok) dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis kasus tersebut. Adapun peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis. 	70 menit

<i>Kegiatan Akhir (penutup)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi tersebut ▪ Peserta didik mendokumentasikan kesimpulan yang telah dibuat oleh guru ▪ Guru mengkaitkan nilai-nilai yang ada dengan kehidupan sehari-hari ▪ Guru menutup proses pembelajaran dengan berdoa dan salam 	11 menit
-------------------------------------	--	----------

Q. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

1. Penilaian Sikap Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses diskusi berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat diskusi berlangsung, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi/ menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.
2. Penilaian pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk menjawab atau melengkapi pertanyaan yang terdapat pada Tabel 1.2. Perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, Tabel 1.3. Periodisasi pemajuan HAM di Indonesia serta Tabel 1.4. Perbandingan Penegakan HAM di Indonesia (Orde Baru dan Orde Reformasi).
3. Penilaian Keterampilan Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab/mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan).

Jenis tagihan : Unjuk kerja

Bentuk tagihan : Diskusi

Bahan diskusi : Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia

Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok

Hari/Tanggal :

Topik diskusi/debat :

Nama Siswa :

Aspek yang dinilai	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif		Deskripsi (Alasan)
Kemampuan mengidentifikasi masalah				
Kemampuan merumuskan masalah				
Kemampuan menganalisis masalah				
Kemampuan memecahkan masalah				
Kerjasama dalam kelompok				
Partisipasi dalam diskusi				
Kemampuan mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain				
Nilai rata-rata				
Komentar				

Rubrik Penilaian Karangan

Aspek yang dinilai	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif		Deskripsi (Alasan)
Pengantar menunjuk isi				
Pengantar disajikan dengan bahasa yang baik				
Isi menunjukkan penjelasan dari kutipan/pendapat tokoh				
Isi disajikan dengan bahasa yang baik				
Penutup memberi kesimpulan akhir terhadap kutipan/pendapat tokoh				

Penutup disajikan dengan bahasa yang baik				
Nilai rata-rata				
Komentar				

Kriteria Penilaian :

Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif	
Memuaskan	4	>80
Baik	3	68-79
Cukup	2	56-67
kurang	1	<55

Klaten, 1 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

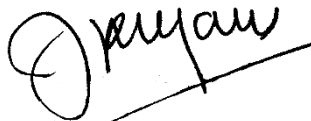
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA N 2 Klaten
Mata Pelajaran	: Pendidikan Kewarganegaraan
Materi Pokok	: Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
Kelas/ Program/ Semester	: X/ UMUM/ GANJIL
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit

R. KOMPETENSI INTI

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

S. KOMPETENSI DASAR

Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

T. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

2. menjelaskan dasar hukum HAM di Indonesia,
3. menjelaskan pengaturan HAM dalam konstitusi,
4. menjelaskan pengaturan HAM dalam TAP MPR,
5. menjelaskan pengaturan HAM dalam undang-undang,
6. menjelaskan pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan keputusan presiden,
7. menerapkan perilaku jujur, disiplin, peduli dan pro aktif selama kegiatan pembelajaran.

U. MATERI PEMBELAJARAN

Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Di Indonesia Pengaturan HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam

pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang HAM. Pertama, dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-Undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam perundang-undangan tertulis memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat kuat, karena perubahan dan/atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia dilakukan melalui proses amandemen dan referendum. Adapun, kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang bersifat global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi Republik Indonesia. Sementara itu, bila pengaturan HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Adapun, pengaturan HAM dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memiliki kelemahan pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

1. Pengaturan HAM dalam Konstitusi Negara

a. UUD 1945

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1)
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2)
- Hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28
- Hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama, Pasal 29 Ayat (2)
- Hak dalam usaha pembelaan negara, Pasal 30
- Hak mendapat pengajaran, Pasal 31
- Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, Pasal 32
- Hak di bidang perekonomian, Pasal 33
- Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 34

b. Konstitusi RIS

Jaminan pemajuan hak asasi manusia, dalam Konstitusi RIS 1949, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Hak diakui sebagai person oleh UU (The Right to recognized as a person under the Law), Pasal 7 Ayat (1)
- Hak persamaan di hadapan hukum (The right to equality before the law), Pasal 7 Ayat (2)
- Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (The right to equal protection againts discrimination), Pasal 7 Ayat (3)

c. UUDS 1950

Perlindungan dan materi muatan hak asasi manusia dalam UndangUndang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Hak atas kebebasan agama, keinsyafan batin, dan pikiran, Pasal 28
- Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, Pasal 19.
- Hak atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang, Pasal 20.

2. Pengaturan HAM dalam Ketetapan MPR

Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Pelaksanaan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.

3. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang

Pengaturan HAM juga dapat dilihat dalam Undang-undang yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.

- UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat
- UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.

4. Pengaturan HAM dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Pengaturan HAM dalam peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden, di antaranya adalah sebagai berikut.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
- Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

V. METODE PEMBELAJARAN

7. Pendekatan Pembelajaran : Scientific
8. Metode Pembelajaran : Diskusi, Tanya jawab
9. Model : inquiry

W. Alat dan sumber pembelajaran

5. Media :

- e) LCD
- f) Powerpoint

6. Sumber :

- i) Lingkungan sekitar
- j) LKS dan buku PKn kelas X
- k) Lembar tugas kelompok
- l) Buku Hukum Hak Asasi Manusia karangan Prof. Philip Alston.

X. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN 2

Langkah	Kegiatan Guru-Siswa	Waktu
<i>Kegiatan Awal</i> (<i>pembukaan</i>)	<ul style="list-style-type: none">▪ Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar dilanjutkan dengan apersepsi dan tak kalah penting aspek sikap spiritual peserta didik.▪ Guru menyampaikan topik tentang “Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”.▪ Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui model pembelajaran inquiry.	10 menit
<i>Kegiatan Inti</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sebelum peserta didik memahami perlunya dasar hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, guru dapat menjelaskan perlunya instrumen nasional dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.▪ Guru memaparkan secara singkat tentang perlunya dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia.▪ Mengumpulkan Informasi Peserta didik diberi waktu untuk membaca buku Teks Pelajaran PPKn kelas X atau sumber lain (seperti	70 menit

website/internet/media cetak/sumber lainnya) tentang instrumen hak asasi manusia

(dalam kegiatan ini sudah terintegrasi dengan kegiatan mengamati dan kegiatan menanya antar sesama peserta didik).

- Mengasosiasikan

Peserta didik diberi waktu untuk menganalisis dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia yang terdapat dalam buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X (Sub bab C dengan membandingkan dari sumber lain yang relevan (website/internet/ sumber lainnya).

Peserta didik melakukan analisis instrumen HAM yang mengatur tentang Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dengan melengkapi Tabel 1.5. Pengaturan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Tabel 1.6. Analisis Perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- Mengkomunikasikan

Secara random (2 s/d 3 orang) peserta didik dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.

Kegiatan Akhir (penutup)

- Guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi tersebut
- Peserta didik mendokumentasikan kesimpulan yang telah dibuat oleh guru
- Guru mengkaitkan nilai-nilai yang ada dengan kehidupan sehari-hari

12 menit

- Guru menutup proses pembelajaran dengan berdoa dan salam

Y. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

4. Penilaian sikap dilakukan dalam bentuk penilaian antarpeserta didik.
5. Penilaian Pengetahuan Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, dimana peserta didik diminta untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan yang terdapat Tabel 1.5. Pengaturan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Tabel 1.6. Analisis Perbandingan Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
6. Penilaian Keterampilan Penilaian ini dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil analisis dari Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang dibuat baik secara lisan (2 s/d 3 orang) maupun secara tertulis (selain 2 s/d 3 orang)
Jenis tagihan : Unjuk kerja

Bentuk tagihan : Diskusi

Bahan diskusi : Perlindungan dan Pemajuan HAM di Indonesia

Rubrik Penilaian Diskusi Kelompok

Hari/Tanggal :

Topik diskusi/debat :

Nama Siswa :

Aspek yang dinilai	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif		Deskripsi (Alasan)
Kemampuan mengidentifikasi masalah				
Kemampuan merumuskan masalah				
Kemampuan menganalisis masalah				
Kemampuan memecahkan masalah				
Kerjasama dalam kelompok				

Partisipasi dalam diskusi				
Kemampuan mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain				
Nilai rata-rata				
Komentar				

Rubrik Penilaian Karangan

Aspek yang dinilai	Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif		Deskripsi (Alasan)
Pengantar menunjuk isi				
Pengantar disajikan dengan bahasa yang baik				
Isi menunjukkan penjelasan dari kutipan/pendapat tokoh				
Isi disajikan dengan bahasa yang baik				
Penutup memberi kesimpulan akhir terhadap kutipan/pendapat tokoh				
Penutup disajikan dengan bahasa yang baik				
Nilai rata-rata				
Komentar				

Kriteria Penilaian :

Nilai kualitatif	Nilai kuantitatif	
Memuaskan	4	>80
Baik	3	68-79

Cukup	2	56-67
Kurang	1	<55

Klaten, 8 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

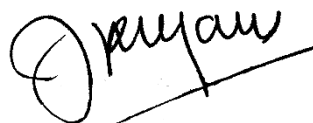
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA NEGERI 2 KLATEN
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/ Semester : X / GASAL
Materi Pokok : Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
Alokasi Waktu : 2 X 45'

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	3.1.1 Mendeskripsikan sistem Pembagian Kekuasaan Negara. 3.1.2 Menjelaskan masing-masing peran dan Fungsi dari Lembaga Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif.

	3.1.3 Mendeskripsikan pelaksanaan dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.
4.1. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	4.1.1 Mengkomunikasikan hasil analisis terkait sistem pembagian Kekuasaan Negara.

C. Materi Pembelajaran

D. Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan

Pemerintahan Negara

1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kekuasaan yaitu:

- (a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
- (b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang
- (c). Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquie kekuasaan negara dibagi :
 - (a). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
 - (b). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang
 - (c). Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang .

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

(a). Pembagian kekuasaan secara horizontal

- (1). Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

(4). Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(5). Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

(b). Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan didaerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Strategi : Pembelajaran kooperatif
3. Model Pembelajaran : Student Team Achipmenacmbat Devision (STAD) dan Think Paire and Share
4. Metode : Pemberian tugas, diskusi.

F. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar, dilanjutkan dengan apersepsi. 2. Menyampaikan materi topik “ Sistem Pembagian Kekuasaan”. 	15 menit
Kegiatan Inti	<p>MENGAMATI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengamati gambar Pemerintahan. 2. Peserta didik mengamati gambar tentang Presiden Jokowi. 3. Peserta didik mengamati gambar DPR, DPD dan MPR. 4. Peserta didik mengamati gambar MA, MK. 5. Peserta didik merumuskan pengertian/ definisi dari Pembagian Kekuasaan Negara. 6. Peserta didik merumuskan peran dan fungsi dari pembagian Kekuasaan Negara yang mana tertuang dalam UUD 1945. <p>MENANYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari gambar yang telah disajikan dalam power point. 2. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik lainnya. 3. Peserta didik secara berkelompok dengan teman sebangku, mendiskusikan tentang peran dan fungsi dari lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. <p>MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI</p>	60 menit

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang disusun. 2. Peserta didik mencari sumber belajar menggunakan sumber lain dari internet. Web, media sosial lainnya, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. <p>MENGASOSIASIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik berdiskusi menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang belum terjawab. 2. Peserta didik menyimpulkan konsep tentang Pembagian Kekuasaan Negara dikaitkan dengan pembagian tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945. <p>MENGGOMUNIKASIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompoknya secara lisan. Masing-masing kelompok saling menanggapi jawaban kelompok lainnya. Hasil tugas kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. 	
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Didik menyimpulkan materi tentang konsep Pembagian Kekuasaan Negara. 2. Peserta didik diingatkembali untuk mempelajari hasil pembelajaran yang telah didiskusikan dalam pertemuan kali ini. 3. Guru menyampaikan salam penutup dan berdoa. 	15 Menit

G. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

a. **Penilaian Sikap**

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

b. **Penilaian pengetahuan**

Penilaian pengetahuan juga dilihat berdasarkan aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, disini yang dilihat ialah bobot dari pengetahuan peserta didik saat menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan.

c. **Penilaian keterampilan**

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan)

2. Instrumen Penilaian

Untuk Instrumen Penilaian Bab I materi Pembagian Kekuasaan Negara terdapat dalam lampiran 1.

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab I tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji

kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Media/ alat, Bahan dan Sumber Belajar

1. Media / Alat

- a. LCD Proyektor.
- b. Kertas HVS
- c. Alat tulis (Spidol, pena, pensil)

1. Bahan Pembelajaran

- a. Power Point tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara.
- b. Gambar tentang Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

2. Sumber Belajar

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa. Halaman-1
- b. UUD NRI Tahun 1945.
- c. Sumber lain yang relevan.
- d. Internet (Blog harus bisa dipercaya)

Klaten, 15 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

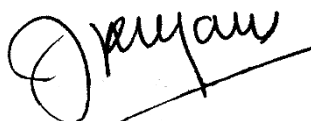
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA NEGERI 2 KLATEN
Mata Pelajaran : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/ Semester : X / GASAL
Materi Pokok : Fungsi dan Kedudukan Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Alokasi Waktu : 2 X 45'

I. Kompetensi Inti (KI)

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
6. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
7. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
8. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

J. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.2. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	3.2.1. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik dan lembaga pemerintah non kementerian 3.2.2. Menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan dalam kerangka NKRI

<p>4.2. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p>	<p>8.1.1 Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan Fungsi dan Kedudukan Kementerian Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian</p>

K. Materi Pembelajaran

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Keberadaan Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- a. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

- a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang namanya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Badan Informasi Geospasial (BIG)
- c. Badan Intelijen Negara (BIN).
- d. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- g. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
- h. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- i. Badan Narkotika Nasional (BNN).
- j. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

L. Metode Pembelajaran

5. Pendekatan : Saintifik
6. Strategi : Pembelajaran kooperatif
7. Model Pembelajaran : Student Team Achipmenacmbat Devision (STAD) dan Think Paire and Share
8. Metode : Pemberian tugas, diskusi.

Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN KE 2 (2 X 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar.2. Apersepsi3. Guru menjelaskan materi “Lembaga Kementrian Republik indonesia Dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian”	10 menit
Kegiatan Inti	<p>MENGAMATI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik merumuskan pengertian/ definisi dari kementrian2. Peserta didik merumuskan peran dan fungsi dari Kementrian Negara Republik Indonesia3. Peserta didik merumuskan kedudukan dan Fungsi pemerintahan Non-Kementrian Negara Republik Indonesia. <p>MENANYA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa	70 menit

	<p>yang sudah mereka amati dari gambar yang telah disajikan dalam power point.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dengan teman sebangku mendiskusikan kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Non Kementrian. 3. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik lainnya <p>MENGUMPULKAN DATA/ INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang disusun. 2. Peserta didik mencari sumber belajar menggunakan sumber lain dari internet. Web, media sosial lainnya, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. <p>MENGASOSIASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik berdiskusi menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang belum terjawab. 2. Dengan bimbingan Guru peserta didik menyimpulkan pentingnya keberadaan kementrian Negara dalam membantu tugas-tugas presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, peserta didik diminta secara berkelompok untuk menyimpulkan tugas dan fungsi kementrian Negara dan lembaga-lembaga pemerinta non kementrian (6 orang). <p>MENGGOMUNIKASIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompoknya secara lisan. Masing-masing kelompok saling menanggapi jawaban kelompok lainnya. Hasil tugas kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. 	
--	--	--

Penutup	<p>2. Peserta Didik menyimpulkan materi tentang kedudukan dan fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia</p> <p>3. Peserta didik diingatkankembali untuk mempelajari hasil pembelajaran yang telah didiskusikan dalam pertemuan kali ini.</p> <p>4. Guru meyampaikan salam penutup dan berdoa.</p>	10 menit
---------	---	----------

M.

N. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

d. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

e. Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan juga dilihat berdasarkan aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, disini yang dilihat ialah bobot dari pengetahuan peserta didik saat menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan.

f. Penilaian keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan)

2. Instrumen Penilaian

Untuk Instrumen Penilaian Bab I materi Pembagian Kekuasaan Negara terdapat dalam lampiran 1.

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

c. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab I tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi

kementerian negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian menadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

O. Media/ alat, Bahan dan Sumber Belajar

2. Media / Alat

- a. LCD Proyektor.
- b. Kertas HVS
- c. Alat tulis (Spidol, pena, pensil)

1. Bahan Pembelajaran

- c. Power Point tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara.
- d. Gambar tentang Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

2. Sumber Belajar

- e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa. Halaman-1
- f. UUD NRI Tahun 1945.
- g. Sumber lain yang relevan.
- h. Internet (Blog harus bisa dipercaya)

Klaten, 22 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

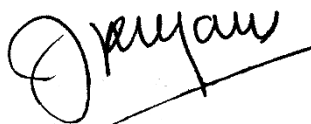
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA NEGERI 2 KLATEN
Mata Pelajaran	: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/ Semester	: X / GASAL
Materi Pokok	: Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Alokasi Waktu	: 2 X 45'

P. Kompetensi Inti (KI)

9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
10. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
11. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
12. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Q. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.3. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	3.3.1. Mengidentifikasi Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila 3.3.2. Menganalisis Nila-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah.
4.3. Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka	12.1.1 Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan Nila-

praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.	nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah
--	--

R. Materi Pembelajaran

1. Sistem Nilai dalam Pancasila Sistem

secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang

apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila Info Kewarganegaraan Nilai-Nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundangundangan yang telah ada, baik itu

ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila.

pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan (fairness) yang nondiskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan dalam membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu. Nilai-nilai itu sesungguhnya jauh lebih luhur dan telah menjadi rumusan hakiki dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tiga nilai utama yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan Sumber: <http://www.kompasiana.com> Gambar 1.6 Nilai dan Sila dalam Pancasila harus menjiwai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

3. Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Nilai Ketuhanan yang maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Nilai Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

S. Metode Pembelajaran

9. Pendekatan : Saintifik
10. Strategi : Pembelajaran kooperatif
11. Model Pembelajaran : Student Team Achipmenacmbat Devision (STAD) dan Think Paire and Share
12. Metode : Pemberian tugas, diskusi.

Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN KE 3 (2 x 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi kegiatan pembelajaran	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. 2. Apersepsi 3. Guru menjelaskan materi “Nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan Negara” 	10 menit
Kegiatan Inti	<p>MENGAMATI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dijelaskan mengenai sistem nilai dalam pancasila 2. Peserta didik merumuskan pengertian/ definisi dari implementasi pancasila 3. Peserta didik mendeskripsikan nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. <p>MENANYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka amati dari gambar yang telah disajikan dalam power point. 2. dengan teman sebangku peserta didik mendiskusikan tentang bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. 3. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik lainnya. <p>MEMPULKAN DATA/INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang disusun. 	70 Menit

	<p>2. Peserta didik mencari sumber belajar menggunakan sumber lain dari internet. Web, media sosial lainnya, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.</p> <p>MENGASOSIASIKAN</p> <p>1. Peserta didik berdiskusi menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang belum terjawab.</p> <p>2. Peserta didik menyimpulkan konsep tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.</p> <p>3. Dengan bimbingan Guru peserta didik menyimpulkan pentingnya nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara.</p> <p>MENGGOMUNIKASIKAN</p> <p>1. Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompoknya secara lisan. Masing-masing kelompok saling menanggapi jawaban kelompok lainnya. Hasil tugas kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>2. Peserta Didik menyimpulkan materi tentang nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>3. Peserta didik diingatkan kembali untuk mempelajari hasil pembelajaran yang telah didiskusikan dalam pertemuan kali ini.</p> <p>4. Guru menyampaikan salam penutup dan berdoa.</p>	10 Menit

Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

g. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

h. Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan juga dilihat berdasarkan aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, disini yang dilihat ialah bobot dari pengetahuan peserta didik saat menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan.

i. Penilaian keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan

dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengkomunikasikan secara lisan)

2. Instrumen Penilaian

Untuk Instrumen Penilaian Bab I materi Pembagian Kekuasaan Negara terdapat dalam lampiran 1.

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

e. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi bab I tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang meliputi sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan peserta didik diminta mengamati pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.

f. Remedial

Kegiatan Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari materi tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, kemudian Guru menyediakan soal-soal latihan terkait Bab tersebut. Peserta didik secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

T. Media/ alat, Bahan dan Sumber Belajar

3. Media / Alat

- a. LCD Proyektor.
- b. Kertas HVS
- c. Alat tulis (Spidol, pena, pensil)

1. Bahan Pembelajaran

- e. Power Point tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Negara.
- f. Gambar tentang Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

2. Sumber Belajar

- i. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas

XI Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indoneisa. Halaman-1

- j. UUD NRI Tahun 1945.
- k. Sumber lain yang relevan.
- l. Internet (Blog harus bisa dipercaya)

Klaten, 29 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

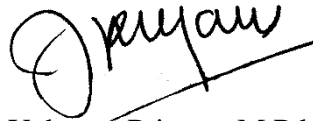
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMA NEGERI 2 KLATEN
Mata Pelajaran	: PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Kelas/ Semester	: X / GASAL
Materi Pokok	: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Alokasi Waktu	: 2 X 45'

U. Kompetensi Inti (KI)

13. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya .
14. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
15. Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan keadilan, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
16. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranag abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

V. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
1.2 Mengorganisasi nilai-nilai konstitusional ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.	1.2.1 Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan,

	<p>pertahanan dan keamanan.</p> <p>1.2.2 Membangun nilai-nilai kerja sama secara adil ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>
<p>2.2 Mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>1.2.1. Membangun nilai-nilai menghargai secara adil ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p> <p>2.2.2. Membangun nilai-nilai kerjasama secara adil ketentuan UUD NRI tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.</p>
<p>3.2 Menganalisis ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>3.2.1 Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3.2.2 Membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia</p> <p>3.2.3 Menganalisis kemerdekaan beragama dan</p>

	berkepercayaan di Indonesia 3.2.4 Mengidentifikasi sistem pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia.
4.2. Menyaji Hasil analisis tentang ketentuan UUD NRI yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan.	4.2.1 Menyaji hasil telaah analisis tentang ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur wilayah negara, agama dan kepercayaan, serta keamanan dan pertahanan. 4.2.2 Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, keamanan dan pertahanan.

W. Materi Pembelajaran

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Memetakan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara

Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosialbudaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang” (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178).

- **Zona Laut Teritorial**

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara). Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut.

- **Zona Landas Kontinen**

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur

pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

- **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jika ada dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemeritah pusat maupun daerah

X. Metode Pembelajaran

- 13. Pendekatan : Saintifik
- 14. Strategi : Pembelajaran kooperatif
- 15. Model Pembelajaran : Student Team Achipmenacmbat Devisio n (STAD) dan Think Paire and Share
- 16. Metode : Pemberian tugas, diskusi.

Kegiatan Pembelajaran

PERTEMUAN KE 3 (2 x 45 menit)

Pertemuan 1 (2 x 45 menit)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
Kegiatan Pendahuluan	3. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan	15 menit

	<p>kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar, dilanjutkan dengan apersepsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan materi topik tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum mengkaji lebih lanjut, terkait dengan sikap sosial. Guru memberikan penguatan tentang aspek motivasi belajar dan sikap spiritual peserta didik berkaitan dengan rasa syukur atas Karunia Allah SWT, sehingga masih dapat melaksanakan aktivitas dengan baik, sehat atas dasar keimanan terhadap Allah SWT. Guru menegaskan kembali tentang topik dan menyampaikan kompetensi yang akan di capai. 	
Kegiatan Inti	<p>MENGAMATI</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik mengidentifikasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , guru menunjukan gambar/ilustrasi /paparan secara singkat tentang wilayah negara Kesatuan RI. Peserta didik di sajikan gambar 2.2 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. <p>MENANYA</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik mebuat pertanyaan tentang gambar 2.2 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (diharapkan peserta didik mampu membuat 5 pertanyaan dengan teman sebangku) <p>MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik dengan kelompok mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di buku atau internet. <p>MENGASOSIASIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik mebuat analsis terkait dengan deskripsi wilayah darat, wilayah 	60 menit

	<p>laut, dan udara yang merupakan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>MENGGOMUNIKASIKAN</p> <p>2. Peserta didik secara random (1 sampai 2 orang mewakili kelompok) dapat mengkomunikasikan secara lisan analisis tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>4. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang wilayah negara kesatuan RI dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik.</p> <p>5. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kasus tersebut.</p> <p>6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.</p>	15 Menit

Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

1. Teknik Penilaian

j. Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

k. Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan penugasan kepada peserta didik.

a) Membuat 5 pertanyaan atas Gambar 2.2. Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kalian mengamati gambar di atas, coba kalian susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian jadikan

pertanyaan-pertanyaan yang kalian rumuskan sebagai bahan diskusi. Tuliskan pertanyaan yang kalian susun dalam tabel di bawah ini.

no	Pertanyaan
1	Bagaimana kondisi wilayah Indonesia di daratan, lautan, dan udara?
2	
3	
4	
5	

(b) Mengumpulkan tugas analisis kelompok atas wilayah darat, laut dan udara yang merupakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

c. Penilaian keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil analisis dari kasus yang dibuat baik secara lisan (2 s/d 3 orang) maupun secara tertulis (selain peserta didik yang mengkomuniikasikan).

Y. Media/ alat, Bahan dan Sumber Belajar

4. Media / Alat

- a. LCD Proyektor.
- b. Kertas HVS
- c. Alat tulis (Spidol, pena, pensil)

1. Bahan Pembelajaran

- g. Power Point tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Gambar tentang Peta Indonesia

2. Sumber Belajar

- m. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMA/MA.SMK.MAK Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoneisa.
- n. UUD NRI Tahun 1945.
- o. Sumber lain yang relevan.
- p. Internet (Blog harus bisa dipercaya)

Klaten, 29 Agustus 2016

Mengetahui,

Guru Pembimbing



Dra. Winarni

NIP.196111112006042002

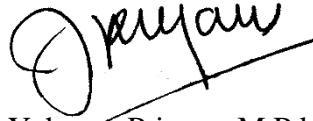
Mahasiswa PPL



Tegar Diansa Umarqis.

NIM.13401244021

Kepala, Sekolah SMA N 2 Klaten



Drs. Yohanes Priyono M.Pd.

NIP. 195705071989031007

NILAI XMIPA I

NO	NAMA	L/P	TUGAS1	TUGAS2	ULANGAN
1	ABEDNEGO HASTO ARUM WAHYUDI	L	86	83	78
2	ADHIRA BHAKTI PERTIWI	P	88	87	73
3	AJENG RAHMAWATI	P	87	81	83
4	ALBINA PAMUKTI ANGGARISMA	P	81	88	91
5	ALISA ANDARI	P	85	93	92
6	ANNISA PUTRI YUSTIANA	P	80	82	78
7	ARINTA SEKAR RAIHANA	P	93	81	78
8	BAYU CRISNA AJI	L	91	90	
9	BEZALEEL YUHEN PUNTO ADI ESTHIYANTO	L	98	80	87
10	BRYAN PRAMUDYA ARDANA	L	93	88	86
11	CHELSE INRIYANI	P	90	82	89
12	COVENANT KOINONIO WIDI WIJAYA	L	86	90	90
13	DESHINTA RAMADHANI BASTIAN PUTRI	P	90	96	84
14	DEYANA HASNAH AFIFAH	P	88	80	91
15	DIYAH UMUL SOLEKHAH	P	70	92	89
16	FATIMAH SAHARA PENGORBANAN	P	90	77	89
17	FEKKY HENDRY LOMBOGIA	L	80	83	69
18	FIDA NISRINA IFTINANI	P	80	96	76
19	GLORY AGVANYA PUSPITASARI	P	93	70	93
20	HISKIA PRADINANTO	L	80	78	81
21	IRMELDA ALYSIA PRAMUDITA	P	86	68	91
22	JACOBAN TANSAHSETYO	L	84	88	50
23	JOVAN AXELL PERDANA	L	86	86	94
24	MARLINDA CHRISTIANA	P	90	92	81
25	MARTA SURYA NINGRUM	P	95	88	92
26	MOCH ARBA SALAHUDDIN MULYONO	L	86	95	83
27	NATALIS VERNANDA DWI SETIANTO	L	86	77	81
28	NATHAVANIA GABRIELA MULIA KARINA	P	93	80	86
29	NURANNISA NADA ARSYFA	P	90	78	77
30	PURWA PUTRA SANG YUDHISTIRA	L	85	76	70
31	RINA PRATIWI	P	90	80	72
32	SEKAR AFIDHA EKA HARTONO	P	80	83	82
33	SHAFIRA FAIRA HUWAIDA	P	86	87	78
34	TITA AMARTA PUTRI	P	83	80	78

X MIPA III

No	NAMA SISWA	L/P	Tugas1	Tugas2	Ulangan
1	AGISTA SOFIA FARA HAMIDA	P	93	81	93
2	ALFINA DWI RAHMAWATI	P	82	85	95
3	AN NISA' NUR AHASANI	P	81	80	91
4	ANISA SETIYANI	P	90	81	91
5	ANNA'S ALISYA SARI	P	80	85	97
6	APRILIA CAHYA RANI	P	88	87	96
7	ARUM NUR ROCHMI	P	82	81	92
8	AXZEL RIFKI FERDINANSAH	L	90	85	83
9	AZHAR RAIS GURITNO	L	96	80	86
10	CALVIN MAHARDIKA	L	86	93	90
11	DESY WULANDARI	P	88	91	91
12	DEWI AYU HARJANI	P	87	88	76
13	ELFRIDA RIYANI	P	81	86	91
14	ERA WIDYA NURCHOTIFAH	P	85	87	97
15	FITRI HASTUTI	P	80	81	93
16	GUNTUR KUSUMA DIHARJO	L	93	85	88
17	HAMMAM ZAUL MUSTAQIM	L	91	80	78
18	HANIF YOGA PRATAMA	L	88	93	96
19	HANIFAH VIDA INDRASARI	P	86	87	91
20	INTAN CAHYANI	P	92	81	96
21	ISNAENI MUHAENIFAH	P	88	85	76
22	ITSNAINI WAHYU UTAMI	P	95	80	90
23	JODY ASHRIB SATRIAYUDISTIRA	L	88	93	93
24	KRESNADI WIDYANTO	L	81	91	86
25	MUH RIJAL IKSANDI	L	85	88	78
26	NAFISA ZAHRAH	P	88	88	93
27	NUGROHO	L	95	87	92
28	ROSY TRI HANDAYANI	P	81	81	87
29	SABILA JATI RAHMAWATI ROSYADI	P	85	85	82
30	SEPTIANA CAHYA KHALIFAH	P	80	80	88
31	SITI FATIMAH AWALIA	P	86	93	83
32	VIVI PRAYUDITA PUAN MAHARANI	P	92	91	97
33	WAHYU NUR WULANDARI	P	81	88	92
34	WILLYANA ANNISA ARIYANTO	P	85	86	95
35	YOSSI YASEVA	P	90	88	95

XMIPA IV

NO	NAMA	L/P	TUGAS1	TUGAS2	ULANGAN
1	Ainun Nadiya Kumala (Nadya)	P	86	88	83
2	Anisa Nurbahri (anisa)	P	84	86	87
3	Anisa Rahmawati (anis)	P	86	88	81
4	Annisa Yeslina Utami (nissa)	P	90	90	
5	Ardiani Dewi Saputri (ardiani)	P	95	91	93
6	Asiyatun (ais)	P	86	90	82
7	Carolina Putri Setyaningsih (putri)	P	86	80	81
8	Cynara Nur Aina (ana)	P	93	87	90
9	Cynara Nur Aini (ani)	P	90	86	80
10	Daffa Aristyo (daffa)	L	85	81	88
11	Damas Baik Ariansyah (damas)	L	90	88	82
12	Darin Huwaida Zain (darin)	P	80	85	90
13	Dea Amalia Ramadhanty (dea)	P	86	90	96
14	Della Putri Wijaya (della)	P	83	88	80
15	Fany Ganesh Ranggawijaya (ganesh)	L	83	93	92
16	Hanantomo (hanan)	L	87	79	77
17	Isnaini Nur Ilma Fadila (ilma)	P	81	88	83
18	Iva Candra Oktavira (iva)	P	88	85	96
19	Kurnia Amirul Trihastuti (kurnia)	P	93	89	70
20	Muhammad Arif Isfiyanto (arif)	L	82	83	78
21	Muhammad Solihin (soleh)	L	81	87	68
22	Muhammad Sulkhan Adha (aka)	L	90	92	88
23	Nasya Fabri Nur Rahmawati (nasya)	P	80	87	86
24	Nino Ibrahim (nino)	L	88	87	92
25	Putri Dani Shinta Pratama (dani)	P	82	92	88
26	Radhina Wulansih (dhina)	P	90	89	95
27	Rafif Dzaki Muhammad (rafif)	L	96	92	77
28	Rahma Putri Sintawati (rahma)	P	80	84	80
29	Risang Arya Yudhantaka (risang)	L	92	87	78
30	Santi Purwaningsih (santi)	P	77	95	76
31	Savitri Dewi Ayuningtyas (savitri)	P	83	85	80
32	Shafridito Arkan Niskala (ditto)	L	96	92	83
33	Tarisa Dewi Adriyanto (tarisa)	P	70	79	87
34	Tasya Alifa Ramadhani (tasya)	P	78	87	80
35	Tsanie Ditya Kurnia (tsanie)	L	83	87	93

XMIPA VII

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TUGAS	ULANGAN	REMIDI
1	ABDULLAH SANGGEM PANGESTU	L	86	69	
2	AKSAURI HANA MALIS	P	88	82	
3	ALFATH MAULANA UMAR	L	87	65	68
4	ANIDA HASNA AZ-ZAHRA	P	81	70	
5	ARDIANTO CATUR WIBOWO	L	85	77	
6	ARGA BIMANTARA	L	80	90	
7	ARUBA RATNA BAHARI	P	93	82	
8	ARUNA KINTAMANI HAYUMURTI	P	91	76	
9	CHISAIKO DEVY RACHMADANI	P	98	94	
10	DELLAROZA AL SENDYA PUTRI	P	93	91	
11	DITA SEPTIANI PUTRI	P		75	
12	FITRIA SETIASIH	P	86	71	
13	ILYAS APRILIAN HARIYANSYAH	L	90	84	
14	KARISMA CHANDRA PUSPITO	P	88	83	
15	LIBNA HAWARI	P	70	79	
16	LILIAN AYUNDA SEPTIANI	P	90	62	
17	MUHAMMAD NUR ICHSAN	L	80	79	
18	MUHAMMAD NUR TAUFIQ	L	80	64	68
19	RIZKA AULIA AKHYAR	P	93	78	
20	ROFIK FAHRUL HIDAYAT	L	80	87	
21	ROMANTIKA DYAH MEILANA SARI	P	86	87	
22	SALSA RISKY RAHMADANI	P	84	60	68
23	SEPHA OKTY HASTANIA	P	86	92	
24	SRI PANGGAH SANTOSANING PAMBUDI	L	90	40	68
25	SUMA DANU	L	95	72	
26	SURYA BINTARA	L	86	75	
27	TEAVIONITA SAGIAN FEBRIYANI	P	86	84	
28	TIARA KUSUMA RINI	P	93	81	
29	TIFFANY NUR RAHMAWATI	P	90	83	
30	VENA ERLA CANDRIKA	P	85	74	
31	WINANGGARI RATRI	P	90	80	
32	ZAHRA RANADHIFA PERTAMA	P	80	80	
33	ZALZA INDAH SHAFIRA	P	86	68	
34	ZULAEHA ROSITA GANI	P	83	79	
35	ZULAICHA HANA PURBANINGRUM	P	96	85	

ABSENSI XMIPA I

NO	NAMA	L/P	26-07-16	02-08-16	09-08-16	16-08-16	23-08-16	30-08-16	06-09-16
1	ABEDNEGO HASTO ARUM WAHYUDI	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ADHIRA BHAKTI PERTIWI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	AJENG RAHMAWATI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ALBINA PAMUKTI ANGGARISMA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ALISA ANDARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ANNISA PUTRI YUSTIANA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ARINTA SEKAR RAIHANA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	BAYU CRISNA AJI	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	BEZALEEL YUHEN PUNTO ADI ESTHIYANTO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	BRYAN PRAMUDYA ARDANA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	CHELSI INRIYANI	P	✓	Izin	✓	✓	✓	✓	✓
12	COVENANT KOINONIO WIDI WIJAYA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	DESHINTA RAMADHANI BASTIAN PUTRI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	DEYANA HASNAH AFIFAH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	DIYAH UMUL SOLEKHAH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	FATIMAH SAHARA PENGORBANAN	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	FEKKY HENDRY LOMBOGIA	L	✓	✓	✓	✓	✓	Izin	✓
18	FIDA NISRINA IFTINANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	GLORY AGVANYA PUSPITASARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	HISKIA PRADINANTO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	IRMELDA ALYSIA PRAMUDITA	P	✓	✓	✓	✓	✓	Izin	✓
22	JACOBIAN TANSAHSETYO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	JOVAN AXELL PERDANA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	MARLINDA CHRISTIANA	P	✓	Izin	✓	✓	✓	✓	✓
25	MARTA SURYA NINGRUM	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	MOCH ARBA SALAHUDDIN MULYONO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	NATALIS VERNANDA DWI SETIANTO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	NATHAVANIA GABRIELA MULIA KARINA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	NURANNISA NADA ARSYFA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	PURWA PUTRA SANG YUDHISTIRA	L	✓	Izin	izin	izin	izin	izin	✓
31	RINA PRATIWI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	SEKAR AFIDHA EKA HARTONO	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	SHAFIRA FAIRA HUWAIDA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	TITA AMARTA PUTRI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ABSENSI XMIPA III

NO	NAMA SISWA	L/P	27-07-16	03-08-16	10-08-16	17-08-16	24-08-16	31-08-16	07-09-16
1	AGISTA SOFIA FARA HAMIDA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ALFINA DWI RAHMAWATI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	AN NISA' NUR AHASANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ANISA SETIYANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ANNA'S ALISYA SARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	APRILIA CAHYA RANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ARUM NUR ROCHMI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	AXZEL RIFKI FERDINANSAH	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	AZHAR RAIS GURITNO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	CALVIN MAHARDIKA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	DESY WULANDARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	DEWI AYU HARJANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ELFRIDA RIYANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ERA WIDYA NURCHOTIFAH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	FITRI HASTUTI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	GUNTUR KUSUMA DIHARJO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	HAMMAM ZAUL MUSTAQIM	L	✓	✓	✓	✓	✓	Izin	✓
18	HANIF YOGA PRATAMA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	HANIFAH VIDA INDRASARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	INTAN CAHYANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ISNAENI MUHAENIFAH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	ITSNAINI WAHYU UTAMI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	JODY ASHRIB SATRIAYUDISTIRA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	KRESNADI WIDYANTO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	MUH RIJAL IKSANDI	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	NAFISA ZAHRAH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	NUGROHO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ROSY TRI HANDAYANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	SABILA JATI RAHMAWATI ROSYADI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	SEPTIANA CAHYA KHALIFAH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	SITI FATIMAH AWALIA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	VIVI PRAYUDITA PUAN MAHARANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	WAHYU NUR WULANDARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	WILLYANA ANNISA ARIYANTO	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	YOSSI YASEVA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ABSENSI XMIPA IV

NO	NAMA	L/P	27-07-16	03-08-16	10-08-16	17-08-16	24-08-16	31-08-16	07-09-16
1	Ainun Nadiya Kumala (Nadya)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
2	Anisa Nurbahri (anisa)	P	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
3	Anisa Rahmawati (anis)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
4	Annisa Yeslina Utami (nissa)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
5	Ardiani Dewi Saputri (ardiani)	P	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
6	Asiyatun (ais)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
7	Carolina Putri Setyaningsih (putri)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
8	Cynara Nur Aina (ana)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
9	Cynara Nur Aini (ani)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
10	Daffa Aristyo (daffa)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
11	Damas Baik Ariansyah (damas)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
12	Darin Huwaida Zain (darin)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
13	Dea Amalia Ramadhanty (dea)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
14	Della Putri Wijaya (della)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
15	Fany Ganesh Ranggawijaya (ganesh)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
16	Hanantomo (hanan)	L	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
17	Isnaini Nur Ilma Fadila (ilma)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
18	Iva Candra Oktavira (iva)	P	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
19	Kurnia Amirul Trihastuti (kurnia)	P	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
20	Muhammad Arif Isfiyanto (arif)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
21	Muhammad Solihin (soleh)	L	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
22	Muhammad Sulkhan Adha (aka)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
23	Nasya Fabri Nur Rahmawati (nasya)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
24	Nino Ibrahim (nino)	L	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
25	Putri Dani Shinta Pratama (dani)	P	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
26	Radhina Wulansih (dhina)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
27	Rafif Dzaki Muhammad (rafif)	L	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
28	Rahma Putri Sintawati (rahma)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
29	Risang Arya Yudhantaka (risang)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
30	Santi Purwaningsih (santi)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
31	Savitri Dewi Ayuningtyas (savitri)	P	✓	✓	✓		Izin	✓	✓
32	Shafridito Arkan Niskala (ditto)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓
33	Tarisa Dewi Adriyanto (tarisa)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
34	Tasya Alifa Ramadhani (tasya)	P	✓	✓	✓		✓	✓	✓
35	Tsanie Ditya Kurnia (tsanie)	L	✓	✓	✓		✓	✓	✓

ABSENSI XMIPA VII

NO	NAMA	L/P	26-07-16	02-08-16	09-08-16	16-08-16	23-08-16	30-08-16	06-09-16
1	ABDULLAH SANGGEM PANGESTU	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	AKSAURI HANA MALIS	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ALFATH MAULANA UMAR	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	ANIDA HASNA AZ-ZAHRA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	ARDIANTO CATUR WIBOWO	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ARGA BIMANTARA	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	ARUBA RATNA BAHARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	ARUNA KINTAMANI HAYUMURTI	P	✓	✓	✓	✓	✓	Izin	Izin
9	CHISAIKO DEVY RACHMADANI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	DELLAROZA AL SENDYA PUTRI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	DITA SEPTIANI PUTRI	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
12	FITRIA SETIASIH	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
13	ILYAS APRILIAN HARIYANSYAH	L	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
14	KARISMA CHANDRA PUSPITO	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	LIBNA HAWARI	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
16	LILIAN AYUNDA SEPTIANI	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
17	MUHAMMAD NUR ICHSAN	L	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
18	MUHAMMAD NUR TAUFIQ	L	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
19	RIZKA AULIA AKHYAR	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
20	ROFIK FAHRUL HIDAYAT	L	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
21	ROMANTIKA DYAH MEILANA SARI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	SALSA RISKY RAHMADANI	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
23	SEPHA OKTY HASTANIA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	SRI PANGGAH SANTOSANING PAMBUDI	L	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
25	SUMA DANU	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	SURYA BINTARA	L	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
27	TEAVIONITA SAGIAN FEBRIYANI	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
28	TIARA KUSUMA RINI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	TIFFANY NUR RAHMAWATI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	VENA ERLA CANDRIKA	P	✓	✓	✓	✓	✓	Izin	Izin
31	WINANGGARI RATRI	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ZAHRA RANADHIFA PERTAMA	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	ZALZA INDAH SHAFIRA	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
34	ZULAEHA ROSITA GANI	P	Izin	Izin	Izin	Izin	✓	✓	✓
35	ZULAICHA HANA PURBANINGRUM	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LAMPIRAN SOAL ULANGAN DAN JAWABAN

SOALA

1. Sebut dan jelaskan pembagian kekuasaan menurut Jhon Locke. . . .

- a. *Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.*
- b. *Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang.*
- c. *Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri.*

2. Apa yang dimaksud kekuasaan eksaminatif dan pada siapakah kekuasaan ini dijalankan. . . .

Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

3. Apa saja kewenangan presiden republic Indonesia sebagai kepala negara (minimal 3)

- a. *Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).*
- b. *Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).*
- c. *Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).*
- d. *Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).*
- e. *Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).*
- f. *Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat 3).*
- g. *Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).*
- h. *Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2).*

4. Sebutkan kementerian yang berada dibawah koordinator kementerian bidang perekonomian (minimal 5). . . .

a) Kementerian Keuangan b) Kementerian Ketenagakerjaan c) Kementerian Perindustrian d) Kementerian Perdagangan e) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat f) Kementerian Pertanian g) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan h) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara j) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5. Jelaskan tugas & fungsi kementerian pendidikan dan kebudayaan beserta nama menteri yang menjabat sekarang. . . .

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;

pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan

pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

menteri yang menjabat sekarang : Muhajir Efendy

6. Sebutkan nama lembaga pemerintahan non kementerian beserta tugasnya. . . .

- a. *Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.*
- b. *Badan Informasi Geospasial (BIG).*
- c. *Badan Intelijen Negara (BIN).*
- d. *Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.*
- e. *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
- f. *Dsb.*

7. Apa saja bentuk sikap positif terhadap system pemerintahan Indonesia di lingkungan sekolah. . . .

-
-
-

8. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila ke dua. . . .

- a. *Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.*
- b. *Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.*
- c. *Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat*

SOAL B

1. Sebut dan jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. . . .

- a. *Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.*
- b. *Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.*
- c. *Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.*

2. Apa yang dimaksud kekuasaan moneter dan pada siapakah kekuasaan ini dijalankan. . . .

Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.”

3. Apa saja kewenangan presiden republic Indonesia sebagai kepala pemerintahan (minimal 3)

- a. *Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).*
- b. *Mengajukan Rancangan Undang Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat 1).*
- c. *Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).*
- d. *Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).*
- e. *Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri (Pasal 17 ayat 2).*
- f. *Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal 20 ayat 2 dan 4).*
- g. *Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1).*
- h. *Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23 ayat 2).*
- i. *Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F ayat 1).*

4. Sebutkan nama lembaga pemerintahan non kementerian beserta tugasnya. . . .

- a. *Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.*
- b. *Badan Informasi Geospasial (BIG).*
- c. *Badan Intelijen Negara (BIN).*
- d. *Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.*
- e. *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
- f. *Dsb.*

5. Sebutkan kementerian yang berada dibawah koordinator kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (minimal 5). . . .

- a) *Kementerian Agama; b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d) Kementerian Kesehatan; e) Kementerian Sosial; f) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; g) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan h) Kementerian Pemuda dan Olahraga.*

6. Jelaskan tugas & fungsi kementerian keuangan beserta nama menteri yang menjabat sekarang. . . .

Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

- a. *Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko*
- b. *Perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;*
- c. *koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;*
- d. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;*
- e. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;*
- f. *pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;*
- g. *pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;*



X MIPA 1



X MIPA 3



X MIPA 1



X MIPA 4



X MIPA 7




NOMOR LOKASI :
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA NEGERI 2 KLATEN
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA : Jalan Angsana, Trunuh, Klaten Selatan, Klaten


No	Nama Kegiatan	Hasil Kuantitatif / Kualitatif	Serapan Dana (Dalam Rupiah)				Jumlah
			Swadaya Sekolah / Lembaga	Mahasiswa	Pemda Kabupaten	Sponsor/ Lembaga Lainnya	
1.	Pembuatan RPP	Kuantitatif : 7 buah RPP siap untuk acuan mengajar. Kualitatif : RPP jelas dan mudah dipahami.	-	Rp 42.000,00	-	-	Rp 42.000,00
2.	Penggandaan soal latihan	Kuantitatif : 40 lembar soal latihan siap untuk latihan siswa. Kualitatif : soal latihan lebih baik setelah dikonsultasikan.	-	Rp 20.000,00	-	-	Rp 20.000,00
3.		Kuantitatif : sebanyak 2 buku pengangan guru. Kualitatif : buku siap digunakan untuk bahan ajar guru. Kuantitatif : sebanyak 2 buah laporan sudah dijilid dengan rapi.	-	Rp 30.000,00	-	-	Rp 30.000,00




4.	Penggunaan buku pegangan guru. Pembuatan laporan PPL	Kualitatif : laporan sudah tersusun dengan baik.	-	Rp 40.000,00	-	-	Rp 40.000,00
	Jumlah						Rp 132.000,00


 Kepala Sekolah
Drs. Johannes Priyono, M.Pd
 NIP. 19570507 198903 1007

Mengetahui,

Guru Pembimbing

Dra. Hj. Winarni
 NIP. 19630506 198903 1 012

Klaten, September 2016

Mahasiswa

Tegar Diansa Umarqis
 NIM. 13401244021



Universitas Negeri Yogyakarta

**LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2016**

F03

Untuk Mahasiswa



Universitas Negeri Yogyakarta

**ANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2016**



Universitas Negeri Yogyakarta

**ANA PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2016**
